

**PENGARUH PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN  
BERDASARKAN PSAK No. 109, AKSESIBILITAS  
KEUANGAN, DAN *VALUE FOR MONEY* TERHADAP  
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL  
ZAKAT  
(Studi pada Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang)**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh :**

**AHMAD RIZQIAWAN  
NIM : 1A.08.1186**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
BANK BPD JATENG  
SEMARANG  
2012**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN  
BERDASARKAN PSAK No. 109, AKSESIBILITAS  
KEUANGAN, DAN *VALUE FOR MONEY* TERHADAP  
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL  
ZAKAT  
(Studi pada Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang)**

Disusun Oleh:

AHMAD RIZQIAWAN

NIM : 1A.08.1186

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

STIE Bank BPD Jateng

Semarang, November 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Winarsih. Msi

NIDN. 0613086204

H. Usman Dachlan, Ssi, MT.

NIDN. 0624047001

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN  
BERDASARKAN PSAK No. 109, AKSESIBILITAS  
KEUANGAN, DAN *VALUE FOR MONEY* TERHADAP  
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL  
ZAKAT  
(Studi pada Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang)**

Disusun Oleh:  
AHMAD RIZQIAWAN  
NIM : 1A081186

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD  
Jateng pada tanggal 23 November 2012

### TIM PENGUJI

1. Nur Anissa, SE, Msi, Ak.  
NIDN.0604037302
2. Mekani Vestari, SE, Msi, Ak.  
NIDN.0016077401
3. H. Usman Dachlan, Ssi, MT  
NIDN. 0624047001

### TANDA TANGAN

.....  
.....  
.....

Mengesahkan,  
Ketua STIE Bank BPD Jateng

Dr.H.Djoko Sudantoko, S.Sos, MM  
NIDN. 0607084501

## ABSTRAKSI

Semakin banyaknya organisasi pengelola zakat (OPZ) ternyata belum mampu menjawab permasalahan klasik yang terjadi di Indonesia yaitu kesenjangan antara potensi dengan realisasi penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Ini diduga dipicu oleh kurang akuntabel dan transparannya organisasi-organisasi pengelola zakat baik itu BAZ yang dinaungi oleh pemerintah maupun LAZ yang merupakan organisasi zakat bentukan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan, *Value for Money* terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Non probability sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 20 lembaga amil zakat di kota Semarang. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dari hasil pengujian diperoleh nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,812 untuk variabel akuntabilitas dan 0,840 untuk variabel transparansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan dan *Value for Money* dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, transparansi, PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan  
*Value for Money*, lembaga amil zakat.

## ABSTRACT

Increasing number of organizations zakat (OPZ) was not able to answer the classic problems that occurred in Indonesia, namely the gap between potential and realized revenue of zakat, infaq, and charity. It allegedly triggered by a lack of accountability and transparency in managing charity organizations either shaded by BAZ and LAZ government is an organization formed by private charity. This study aimed to determine the effect of the application of SFAS No.. 109, financial accessibility, Value for Money in the accountability and transparency of institutions amil zakat. The sampling method used in this study are non-probability sampling, with a total sample of 20 institutions in the city of Semarang amil zakat, analysis used is multiple linear regression. From the test results obtained Adjusted R<sup>2</sup> values of 0.812 to 0.840 for the variable accountability and transparency variables. The results of the analysis showed that the application of SFAS No.. 109, financial accessibility and Value for Money can be used to measure the accountability and transparency of institutions amil zakat.

Keywords: Accountability, transparency, PSAK No. 109, financial accessibility Value for Money, amil zakat institutions.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Ahmad Rizqiawan

NIM : 1A.08.1186

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK No. 109, AKSESIBILITAS KEUANGAN, DAN *VALUE FOR MONEY* TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT(Studi pada Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang)** telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Semarang, November 2012

Ahmad Rizqi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Antara sungguh-sungguh dan sukses itu tidak bersebelahan tapi ada jarak. Jarak ini bisa hanya satu sentimeter tapi bisa juga ribuan kilometer . jarak ini bisa ditempuh dalam hitungan detik tapi juga bisa puluhan tahun

Jarak antara sungguh-sungguh dan sukses hanya bisa diisi sabar. Sabar yang aktif, sabar yang gigih, sabar yang tidak menyerah, sabar yang penuh dari pangkal sampai ujung yang paling ujung. sabar yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan seakan –akan itu sebuah keajaiban dan keberuntungan. Padahal keberuntungan adalah hasil kerja keras, doa dan sabar yang berlebih-lebih.

Bagaimanapun tingginya impian, dia tetap wajib dibela habis-habisan walau hidup sudah digelung nestapa akut. Hanya dengan sungguh-sungguhlah jalan sukses terbuka. Tapi hanya dengan sabarlah takdir itu terkuak menjadi nyata. Dan ALLAH selalu memilihkan yang terbaik dan paling kita butuhkan Itulah hadiah ALLAH untuk hati yang kukuh dan sabar.

“Man jadda wa jadda”

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil

“Man shobara zhafira”

Barangsiapa yang bersabar pasti akan beruntung

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- ✧ Abah dan Mamaku Tercinta
- ✧ Saudara dan Sahabatku
- ✧ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Pengaruh Penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, Aksesibilitas keuangan, Value for money terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat**”

Skripsi ini penulis susun, guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng Jurusan Akuntansi.

Peran serta berbagai pihak turut menentukan terselesaikannya penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM. selaku Ketua STIE Bank BPD Jateng.
2. Ibu Nur Anissa, SE, Msi, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Bank Bpd Jateng.
3. Ibu Dra. Winarsih, MSi. selaku Dosen Pembimbing pertama telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka menyusun skripsi ini.
4. Bapak H. Usman Dachlan, Ssi, MT. selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka menyusun skripsi ini.
5. Ibu Yohana Kus Suparwati, SE, Msi. selaku Dosen Wali yang membimbing penulis selama studi di STIE Bank BPD Jateng.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng.
7. Abah dan Mamakku yang selalu memberikan dorongan, semangat, cinta serta doa hingga selesainya skripsi ini

8. Kakakku Muhammad Nizar Istiawan, Nur Afni Yulihanisa dan Femy Rachmawati yang selalu memfasilitasi apa yang aku butuhkan selama penulisan skripsi ini dan selalu mendukung ku hingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh Lembaga Amil Zakat di kota Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.
10. Keponakanku Syafiq Maulana Yassar, yang mampu membantu Om menghilangkan stress saat menyusun Skripsi ini
11. Sahabat-sahabatku di STIE Bank BPD Jateng, Deni Irawan, Septian, Dwi Purwanti, Denny Eko, Nunik, Yudha, Lilis, Ahmad Asrori, Wawan Setiawan, Ivan Hartas, Mas Chandra, Nur khasanah, dan Ibnu Terimakasih sudah mendukung, menemani dan berbagi canda tawa, Semoga kenangan kita selama masa-masa perkuliahan akan menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
12. Rekan-rekan serta Adik-adikku di keluarga besar ROHIS STIE Bank BPD Jateng, BEM 2011, COMES. Ingat, Prestasi itu lebih berisi daripada Gengsi.
13. Teman-teman Angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga sukses semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng.

Semarang, November 2012

Penulis

Ahmad Rizqi

## DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Halaman persetujuan.....	ii
Halaman pengesahan.....	iii
Abstrak Bahasa Indonesia.....	iv
Abstrak Bahasa Inggris.....	v
Surat Pernyataan.....	vi
Moto dan persembahan.....	vii
Kata pengantar.....	viii
Daftar isi.....	x
Daftar tabel.....	xiv
Daftar gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
<b>I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Pembatasan masalah.....	10
1.3 Perumusan masalah.....	10
1.4 Tujuan penelitian.....	11
1.5 Manfaat penelitian	
1.5.1 Manfaat teoritis.....	12
1.5.2 Manfaat praktis.....	12
1.6 Kerangka penelitian.....	12
<b>II. Tinjauan pustaka</b>	

2.1 Akuntabilitas.....	14
2.1.1 Indikator Akuntabilitas.....	19
2.2 Transparansi.....	20
2.2.1 Indikator Transparansi.....	23
2.3 Penerapan PSAK No. 109.....	23
2.3.1 Tujuan utama Standar akuntansi.....	24
2.3.2 Dimensi laporan keuangan.....	24
2.3.2.1 Pengakuan dan pengukuran.....	24
2.3.2.2 Penyajian.....	27
2.3.2.3 Pengungkapan.....	27
2.3.3 Laporan keuangan amil.....	29
2.4 Aksesibilitas Keuangan.....	31
2.5 <i>Value for Money</i> .....	32
2.5.1 Pengertian <i>Value for Money</i> .....	33
2.5.2 Pengukuran <i>Value for Money</i> .....	34
2.5.3 Langkah- langkah pengukuran <i>Value for Money</i> .....	35
2.6 Pengembangan Hipotesis	
2.6.1 Hubungan antara penerapan PSAK No.109 dengan akuntabilitas	37
2.6.2 Hubungan antara aksesibilitas keuangan dengan akuntabilitas....	38
2.6.3 Hubungan antara <i>Value for Money</i> dengan akuntabilitas.....	39
2.6.4 Hubungan antara penerapan PSAK No. 109 dengan transparansi..	41
2.6.5 Hubungan antara aksesibilitas keuangan dengan transparansi.....	42
2.6.6 Hubungan antara <i>Value for Money</i> dengan transparansi.....	43

2.7 Model penelitian.....	44
---------------------------	----

### III. Metode penelitian

3.1 Definisi konsep.....	45
--------------------------	----

3.1.1 Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109.....	45
---	----

3.1.2 Aksesibilitas keuangan.....	46
-----------------------------------	----

3.1.3 <i>Value for Money</i> .....	46
------------------------------------	----

3.1.4 Akuntabilitas dan transparansi.....	46
---	----

3.2 Definisi operasional.....	47
-------------------------------	----

3.3 Populasi dan Sampel.....	51
------------------------------	----

3.4 Metode pengumpulan data.....	52
----------------------------------	----

3.5 Metode analisis data.....	53
-------------------------------	----

3.5.1 Analisis Statistik deskriptif.....	53
--	----

3.5.2 Uji Validitas.....	54
--------------------------	----

3.5.3 Uji Reliabilitas.....	54
-----------------------------	----

3.5.4 Regresi linier berganda.....	55
------------------------------------	----

3.5.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	56
--------------------------------	----

a. Uji Normalitas.....	56
------------------------	----

b. Uji Multikolonieritas.....	57
-------------------------------	----

c. Uji Heteroskedastisitas.....	57
---------------------------------	----

3.5.4.2 Uji kebaikan model.....	58
---------------------------------	----

a. Uji koefisien determinasi ( <i>R Square</i> ).....	58
---	----

b. Uji F.....	59
---------------	----

3.5.4.3 Uji statistik t (Uji signifikansi parameter individual).....	60
--	----

#### IV. Gambaran umum obyek dan pembahasan hasil penelitian

4.1 Gambaran responden.....	62
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	64
4.2.1 Analisis statistik deskriptif.....	64
4.2.2 Uji kualitas data.....	67
4.3 Analisis dan Pembahasan.....	69
4.3.1 Variabel akuntabilitas.....	69
4.3.1.1 Uji asumsi klasik.....	69
a. Uji normalitas.....	70
b. Uji multikolonieritas.....	71
c. Uji heteroskedastisitas.....	71
4.3.1.2 Hasil regresi.....	72
4.3.1.3 Uji kebaikan model	
a. Uji koefisien determinasi ( <i>R Square</i> ).....	74
b. Uji F.....	74
4.3.1.4 Uji Hipotesis.....	75
1. Uji -t.....	75
2. Pengujian Hipotesis.....	75
4.3.2 Variabel Transparansi.....	77
4.3.2.1 Uji asumsi klasik.....	77
a. Uji normalitas.....	77
b. Uji multikolonieritas.....	79
c. Uji heteroskedastisitas.....	79

4.3.2.2 Hasil regresi .....	80
4.3.2.3 Uji kebaikan model	
a. Uji koefisien determinasi ( <i>R Square</i> ).....	82
b. Uji F.....	82
4.3.2.4 Uji Hipotesis .....	83
1. Uji –t.....	83
2. Pengujian Hipotesis.....	83
V. Penutup	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Keterbatasan.....	88
5.3 Saran.....	88
5.4 Implikasi Manajerial.....	88

Daftar pustaka

Lampiran

#### DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel X1.....	48
Tabel 3.2 Operasionalisasi variabel X2.....	49
Tabel 3.3 Operasionalisasi variabel X3.....	49
Tabel 3.4 Operasionalisasi variabel Y.....	50
Tabel 4.1 Daftar lembaga amil zakat.....	62
Tabel 4.2 Profil responden.....	63
Tabel 4.3 Hasil statistik deskriptif.....	64
Tabel 4.4 Kualifikasi masing-masing variabel.....	65

Tabel 4.5 Hasil pengujian validitas .....	67
Tabel 4.6 Hasil uji reliabilitas.....	69
Tabel 4.7 Hasil uji normalitas residual .....	69
Tabel 4.8 Hasil uji multikolinearitas .....	71
Tabel 4.9 Hasil uji heteroskedastisitas .....	71
Tabel 4.10 Model regresi Akuntabilitas.....	72
Tabel 4.11 Hasil uji koefisien determinasi .....	74
Tabel 4.12 Hasil uji F .....	74
Tabel 4.13 Hasil uji normalitas residual .....	78
Tabel 4.14 Hasil uji multikolinearitas .....	79
Tabel 4.15 Hasil uji heteroskedastisitas .....	79
Tabel 4.16 Model regresi Transparansi.....	81
Tabel 4.17 Hasil uji koefisien determinasi .....	82
Tabel 4.18 Hasil uji F .....	82

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka penelitian.....	13
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	44
Gambar 4.1. Histogram Akuntabilitas.....	70
Gambar 4.2. PP Plot Akuntabilitas.....	70
Gambar 4.3. Scatterplot Akuntabilitas.....	72
Gambar 4.4. Histogram Transparansi.....	78
Gambar 4.5. PP Plot Transparansi.....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuesioner
2. Hasil Kuesioner
3. Tabel Validitas (R Product Moment)
4. Hasil Validitas dan Reliabilitas
5. Hasil Uji Normalitas (Normal P-Plot)
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatter Plot)
7. Hasil Regresi Linier berganda
8. Surat keterangan
9. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, tidak seperti ibadah shalat dan puasa, zakat relatif tertinggal dalam tataran sosialisasi dan implementasinya, dalam hal pengumpulan dana zakat. menurut Rini Supri H, praktisi zakat dari Dompot Dhuafa (VOA News, 2011:11) dari potensi zakat Indonesia yang berjumlah sekitar Rp.217 Triliun, namun realisasinya baru terkumpul sekitar Rp.1,5 Triliun. Padahal, sebuah perhitungan dalam penelitian yang dilakukan oleh pusat bahasa dan budaya Universitas Islam Negeri (PBB UIN) Syarif Hidayatullah (2005) terungkap bahwa rata-rata sumbangan yang diberikan keluarga muslim setiap tahunnya adalah Rp. 409.267,- dalam bentuk uang tunai dan Rp. 148.200,- dalam bentuk barang. Jika jumlah ini diproyeksikan kepada seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam, yakni kira-kira 34,8 juta keluarga, potensi keseluruhan nilai sumbangan dalam bentuk uang tunai adalah 14,2 triliun rupiah dan dalam bentuk barang adalah 5,1 triliun rupiah setiap tahun. Kondisi ini menjadi pertanyaan besar yang perlu mendapat perhatian bersama.

Menurut Adnan (2001) setidaknya ada dua penyebab rendahnya kolektibilitas dana zakat di Indonesia. Pertama masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, terletak pada aspek kelembagaan zakat. Aspek kelembagaan pengelola zakat ini bersumber dari variabel eksistensi dan profesionalisme organisasi pengelola zakat.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sadeli, 2010)

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-campo and Tomasi dalam Mulyana, 2006). Lembaga amil zakat harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai lembaga amil zakat tidak akuntabel maka akan menimbulkan ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan tersebut dibuktikan dalam survei nasional yang dilakukan pusat bahasa dan budaya Universitas Islam Negeri (PBB UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan dipublikasikan melalui website [www.uinjkt.ac.id](http://www.uinjkt.ac.id) pada tahun 2005 yang melibatkan ribuan responden. Dalam surveinya UIN menemukan sebesar 97% responden menghendaki LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan. Sebanyak 90% responden mengharapkan publik diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola oleh LAZ. Sebesar 92% responden menginginkan adanya pemuatan laporan keuangan di media massa. Kemudian sebanyak 88% responden menyampaikan perlunya mendata para donator. Sebesar 75% responden enggan menyalurkan zakat ke LAZ yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya. Bahkan sebesar 63% responden ingin memastikan bahwa dana publik yang disalurkan memang kepada yang berhak mendapatkan. Selain mendesaknya tuntutan masyarakat agar LAZ dikelola secara akuntabel dan transparan, hasil survei tersebut juga membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana.

Dari hasil survey di atas, menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Jika lembaga amil zakat dinilai akuntabel dan transparan maka masyarakat tidak akan ragu-ragu

untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya melalui lembaga amil zakat. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan potensi dan realisasi. .

Akuntabilitas suatu lembaga akan sangat terkait erat dengan legitimasi lembaga itu sendiri. Artinya, lembaga yang tidak melaksanakan prinsip akuntabilitas, cepat atau lambat akan kehilangan legitimasinya. Sedangkan legitimasi suatu lembaga akan sangat terkait erat dengan keberlanjutan lembaga itu sendiri. Artinya, hanya lembaga yang memiliki legitimasi, diterima kehadirannya, dipandang baik kerjanya, penting perannya serta yang akan memiliki daya keberlanjutan sebagai suatu lembaga. Legitimasi di sini tidak sekadar legitimasi secara hukum, seperti memiliki akta pendirian atau tidak, Legitimasi suatu lembaga harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas terkait dengan penerimaan, kepercayaan, dukungan dan citra yang baik.

Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent-principal relationship*. *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya pada *principal*.

*Principal* melepaskan kontrol atas sumber daya kepada *agent*, memberikan instruksi atas ekspektasi tentang penggunaan sumber daya, sedangkan *agent* bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas dan penggunaan sumber daya tersebut. hubungan *agent* dan *principal* dalam kajian ini (yaitu: konteks manajemen keuangan organisasi pengelola zakat) lebih luas dari pengertian di atas. Dalam pengertian umum seperti di atas, *principal* adalah pemegang saham (*Stockholders*) sedangkan *principal* dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah pemberi amanah (*muzakki*) dan pemerintah. Ini berarti bahwa manajemen pengelola (*agent*) harus mempertanggung- jawabkan atas penggunaan sumber daya kepada kedua pihak di atas.

Akuntabilitas berarti kewajiban dasar bagi sebuah badan (Negara, bisnis, LSM) untuk memperhatikan masyarakat atau pemegang saham bagi berbagai

kegiatan dan prestasi mereka. Prinsip ini menjamin bagi masyarakat bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa dan bagaimana keputusan dibuat serta apa alasan yang mendasarinya.

Pada saat yang sama, prinsip transparansi merujuk pada sikap terbuka seseorang kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur dan adil seraya mencermati hak-hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku unsur yang bekerja. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, dalam Mulyana 2006). Menurut IMF transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ada ketersediaan informasi kepada publik, ada proses penganggaran yang terbuka dan ada jaminan integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi dan penjabarannya (Schiavo-Campo and Tomasi dalam Mulyana 2006).

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2002).

Sementara itu banyaknya potensi dana masyarakat yang terlibat dalam organisasi nirlaba, khususnya pada lembaga pengelola zakat menyebabkan organisasi-organisasi tersebut membutuhkan banyak informasi mengenai bagaimana tata cara pengelolaannya, baik dari segi akuntansi maupun dari segi manajemen keuangan. Sebaliknya, masyarakat juga sangat membutuhkan informasi akuntansi mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah, ini berkaitan dengan usaha untuk membangun kepercayaan mereka akan lembaga pengelola zakat yang amanah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah secara lebih sistematis dan professional dalam rangka turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari sisi akuntansi, Ikatan akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat. Dengan adanya standar pelaporan ini, diharapkan laporan keuangan organisasi pengelola zakat dapat lebih mudah

dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (IAI, 2011). Pada saat ini literatur-literatur yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri hanya sedikit yang membahas perlakuan akuntansi dan laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat, terutama yang berkaitan langsung dengan prakteknya pada pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh di Indonesia. Dikhawatirkan kondisi ini membuat penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan pada sebagian besar organisasi pengelola zakat tidak sesuai dengan PSAK No 109 sebagai standar yang telah ditetapkan oleh IAI untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat

Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. PSAK Nomor 109 (IAI, 2011) memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi pengelola zakat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi pengelola zakat

Dalam konteks pengelolaan dana zakat, transparansi menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat khususnya lembaga amil zakat (LAZ) sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses (aksesibilitas) bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain piagam organisasi dan mekanisme kontrol

internal dan eksternal. Audit eksternal harus dilakukan untuk mendorong transparansi organisasi-organisasi pengelola zakat, sesuatu yang sejauh ini belum dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas organisasi-organisasi modern menjadi jelas (Herlina, 2004).

Ketidakkampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al dalam Mulyana, 2006). Oleh karena itu lembaga amil zakat harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar menyampaikannya ke *muzakki* saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat di baca dan di pahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website* (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas lembaga terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Untuk menanggapi permasalahan tersebut, LAZ tentu akan lebih bijak jika mengagendakan masalah tersebut dalam rapat manajemen untuk segera dicarikan solusinya. Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat (LAZ) sudah semestinya dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa akademisi, diantaranya adalah Rifki (2006) yang meneliti tentang akuntabilitas keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di daerah istimewa Yogyakarta yang menunjukkan bahwa OPZ telah melaksanakan akuntabilitas publik dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat dengan berbagai bentuk seperti menyusun laporan rutin kepada *muzakki*, bulletin, dan publikasi di media massa,

Penerapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan

transparansi lembaga tersebut, seperti penelitian Zein (2011) tentang pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi yang hasilnya terdapat pengaruh positif penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas. Ini menunjukkan jika semakin baik penerapan standar akuntansi suatu lembaga maka semakin baik pula akuntabilitas lembaga tersebut.

Terkait perlunya penelitian tentang sejauh mana penerapan standar akuntansi di suatu lembaga, sudah dilakukan oleh Nurdiono (2007) yaitu tentang penerapan PSAK No. 45 pada organisasi pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat persamaan terhadap laporan keuangan yang digunakan, dalam hal ini laporan keuangan modifikasi Widodo dan Kustiawan dengan standar yang dikeluarkan IAI yaitu PSAK No. 45.

. Dari uraian di atas maka penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi perlu dilakukan. Hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan dapat dijadikan dasar untuk menghasilkan rekomendasi bagi lembaga amil zakat tentang penerapan standar akuntansi yang dapat berperan dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi, sehingga akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

Penelitian terdahulu yang menginvestigasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan oleh Zein (2011), Kadarmi (2007), dan Mulyana (2006). Dalam penelitian Zein (2011), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disertakan sebagai prediktor akuntabilitas dan transparansi, sedangkan pada penelitian Kadarmi (2007) dan Mulyana (2006) aksesibilitas keuangan dijadikan prediktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi dan aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga.

Pada dasarnya standar akuntansi memuat pernyataan-pernyataan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan supaya lebih relevan, andal, dan dapat diperbandingkan sehingga mudah dipahami oleh para pengguna akuntansi,

kemudian aksesibilitas keuangan yang dihubungkan dengan tingkat kemudahan memperoleh informasi berupa laporan keuangan lembaga amil zakat yang diperlukan masyarakat untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat. Ini tentunya menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat dari segi pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Faktor-faktor di atas sudah menjawab pertanyaan akuntabilitas dan transparansi dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akan tetapi belum menjawab pertanyaan tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat dari segi pengelolaan dana. Apakah dalam pelaksanaannya lembaga amil zakat sudah benar-benar mengelola dana umat dengan baik, dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui program-program pemberdayaan.

Lembaga amil zakat merupakan organisasi nirlaba yang sumber pendanaannya sebagian besar didapat melalui penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dalam pengelolaan dananya lembaga amil zakat harus amanah, karena para muzakki sebenarnya sudah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh lembaga amil zakat melalui program-program pemberdayaan yang dapat berperan untuk pengentasan kemiskinan. Tentunya harus ada alur pengelolaan yang jelas dan kehati-hatian dalam pemanfaatannya, jangan sampai dana yang disalurkan dan program-program yang dibuat kurang tepat sasaran sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat selaku pemberi dana.

*Value for Money* merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berusaha untuk mendapatkan laba (swasta) atau perusahaan yang non profit seperti perusahaan sektor publik (pemerintah). *Value for Money* adalah penilaian kinerja yang meliputi efisiensi, efektivitas dan ekonomi. Penilaian kinerja *value for money* memungkinkan lembaga amil zakat bekerja berdasarkan nilai efektif yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program yang dengan target yang ditetapkan oleh manajemen LAZ, nilai efisien yang diukur dengan rasio antara *output* yang dihasilkan oleh dengan *input* yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat dan nilai ekonomis yang mengedepankan

perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Jika ketiga nilai tersebut sudah diterapkan oleh lembaga amil zakat maka LAZ bisa dikatakan baik dari sisi pengelolaan dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri manajemen LAZ untuk meningkatkan akuntabilitasnya melalui laporan keuangan.

Oleh karena itu selain standar akuntansi dan aksesibilitas keuangan ditambahkan variabel *value for money* yang juga perlu dipertimbangkan untuk menginvestigasi perwujudan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat. Penggunaan *value for money* juga didukung oleh penelitian Mardiasmo (2006). Dalam penelitiannya ia mengemukakan pentingnya pelaksanaan *value for money* sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi lembaga sektor publik. Dengan penambahan variabel *value for money* diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat dari sisi pengelolaan.

Dengan demikian, studi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini merujuk pada model penelitian Zein (2011) tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap akuntabilitas dan transparansi, serta penelitian Kadarmi (2007) dan Mulyana (2006) tentang pengaruh aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga, serta dengan menambahkan variabel *value for money* sebagaimana penelitian Mardiasmo (2006).

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dengan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat, sehingga bisa dijadikan sebagai wacana oleh pengelola lembaga amil zakat dalam mengambil keputusan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi lembaga guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini berhasil sesuai dengan tujuan serta untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan ruang lingkup terbatas

pada lembaga amil zakat yang dikukuhkan pendiriannya melalui SK Menkumham atau terdaftar di akta notaris selain itu untuk memudahkan penelitian peneliti membatasi entitas yang diteliti pada lingkup Kota Semarang

### **1.3 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah dan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti maka yang menjadi bahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK no. 109 terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat?
2. Bagaimana pengaruh penerapan aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat?
3. Bagaimana pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat?
4. Bagaimana pengaruh penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK no. 109 terhadap transparansi lembaga amil zakat?
5. Bagaimana pengaruh penerapan aksesibilitas keuangan terhadap transparansi lembaga amil zakat?
6. Bagaimana pengaruh *value for money* terhadap transparansi lembaga amil zakat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK no. 109 terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *value for money* terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat

4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK no. 109 terhadap transparansi lembaga amil zakat.
5. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas keuangan terhadap transparansi lembaga amil zakat.
6. Untuk mengetahui pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik

### **1.5.2 Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Mampu memberikan pemahaman bagi penulis mengenai pengelolaan zakat pada LAZ pada umumnya dan penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK no.109, *VFM* dan aksesibilitas keuangan khususnya.

#### **b. Bagi manajemen perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana bagi manajemen lembaga amil zakat dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat.

#### **c. Bagi Pembaca**

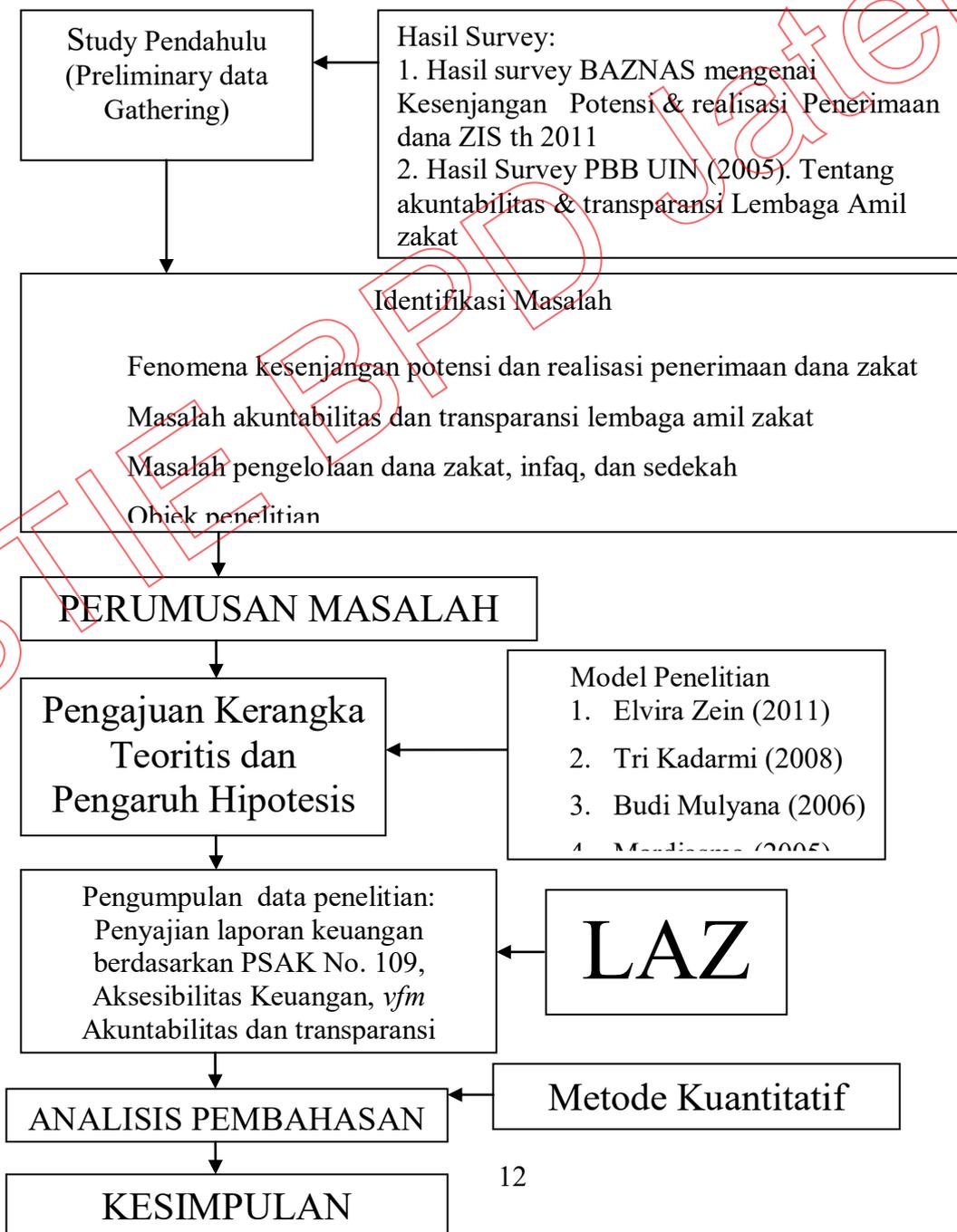
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana untuk penelitian berikutnya dan menjadi masukan dalam pengambilan keputusan dalam berzakat

## 1.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini berisi bagan yang menjelaskan proses atau alur penelitian yang dilakukan, dimulai dari studi pendahuluan hingga penarikan kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

### Kerangka Penelitian



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai suatu prinsip *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola sumber dana. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik” (2000:2) Menurut Lenvine ( Dwiyanto, 2005:147) mendefenisikan akuntabilitas adalah :

“akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*”.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

Ada dua bentuk akuntabilitas menurut Guy Peters (2007). Pertama, akuntabilitas sebagai tuntutan terhadap organisasi-organisasi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Harus ada laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) yang dipublikasikan. Pengertian akuntabilitas yang pertama menekankan pentingnya laporan pertanggungjawaban guna mendorong perilaku pengelola zakat agar sesuai etika dengan memungkinkan pihak luar organisasi tersebut

mengidentifikasi, mempertanyakan, dan mengoreksi yang terjadi. Jadi kontrol dari luar memungkinkan mengorganisasi tanggung jawab melalui sanksi dan imbalan.

Kedua, akuntabilitas dalam kerangka tanggung jawab, yaitu menjamin perilaku organisasi agar sesuai dengan pelayanannya kepada publik. Akuntabilitas jenis ini lebih menekankan nilai-nilai yang telah dibatinkan sebagai pelayan publik sesuai tuntutan etis. Akuntabilitas ini menolong mempertajam makna tanggung jawab. Bentuk ini mengandaikan adanya sistem layanan publik yang telah terlembagakan secara baik. Kurangnya komitmen terhadap standar perilaku dan kelemahan dalam mengontrol kepentingan diri atau kelompok akan membahayakan sistem pelayanan publik yang sudah berjalan baik.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (KNKG, 2006).

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-campo and Tomasi dalam Mardiasmo, 2006). Akan tetapi perusahaan akan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperolehnya dalam melakukan pengungkapan . menurut Suropto (1998). Biaya pengungkapan yang harus dipertimbangkan adalah biaya pengungkapan langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut ini.

1. Biaya langsung meliputi biaya pengumpulan data, biaya pemrosesan informasi biaya pengauditan dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya tidak langsung meliputi biaya litigasi, biaya kerugian persaingan, dan biaya politik.

Selain biaya-biaya, ada beberapa alasan yang melandasi perusahaan enggan melakukan pengungkapan informasi yaitu:

1. pengungkapan akan membantu para pesaing dan merugikan pemegang saham.
2. Pengungkapan yang lengkap akan memberikan keuntungan kepada serikat pekerja dalam hal tawar menawar upah.
3. adanya keraguan terhadap kemampuan investor dalam memahami kebijakan dan prosedur akuntansi sehingga pengungkapan informasi secara penuh akan menyesatkan mereka.
4. tersedianya sumber-sumber informasi lain selain laporan keuangan yang tersedia dengan biaya yang lebih murah
5. kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan investor juga merupakan alasan bagi disclosure yang terbatas.

Jika kemudian pengungkapan informasi memberikan manfaat melebihi biaya yang dikeluarkan perusahaan maka akan mendorong perusahaan akan mengungkapkan aktivitas kinerja financial maupun aktivitasnya kepada masyarakat. . Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan sukarela adalah biaya modal yang rendah (Elliot, Robert K. dan Jacobson, Peter D, 1994 dalam Sutomo, 1994). Pengungkapan informasi oleh perusahaan diharapkan akan membantu investor dan kreditor memahami risiko investasi.

Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan.

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan (Healy, Palepu, 1993 dalam Sotomo, 2004). Dalam konteks pengungkapan sukarela manajemen perusahaan bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi lainnya yang dianggap relevan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh pemakai laporan tahunan (Meek, Gary K, Clare B. Robert dan Sidney J. Gray, 1995 dalam Sutomo, 2004).

Pertimbangan manajemen untuk memberikan, mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biayanya

Adapun manfaat jika perusahaan mengungkapkan aktivitas dan kinerja finansialnya adalah (Anggara, 2010):

1. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat.
2. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi.
3. Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar.
4. Meningkatkan daya saing organisasi.
5. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para *stakeholder* dan kapasitasnya untuk inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para *stakeholder*.

Beberapa keuntungan dari akuntabilitas sebuah lembaga organisasi non pemerintah antara lain:

Akuntabilitas mampu menjawab pertanyaan siapa yang paling diuntungkan dengan program-program lembaga, oleh karenanya secara langsung maupun tidak akan meningkatkan kredibilitas lembaga.

1. Akuntabilitas berpotensi positif untuk meningkatkan kepercayaan dan komitmen dari para pemangku kepentingan karena dapat membuktikan efektivitas organisasi dan menunjukkan organisasi yang mewakili. Hal demikian meningkatkan legitimasi lembaga.
2. Akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat, baik staf maupun konstituen.
3. Akuntabilitas dapat membantu counter kritik bahwa lembaga adalah tidak demokratis dalam pengambilan keputusan, serba rahasia, tidak memiliki standar yang ketat seperti organisasi pemerintah.

Halim. (2002) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Teori asimetri informasi

(*information asymetry*) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen

Scott dalam Saufi (2009) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas entitas terutama dalam bidang keuangan kepada para *stakeholders*

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship, stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari : (1) akuntabilitas vertikal, dan (2) akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. kepada Masyarakat Luas. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Turner and Hulme dalam Aminnurasid 2010). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan

akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan kepada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya pembuatan laporan keuangan eksternal. Mardiasmo, 2002.

Akuntabilitas secara garis besar adalah meliputi tahapan-tahapan:

1. Penyusunan Kinerja
2. Pengukuran kinerja,
3. Pelaporan kinerja, Dan
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara Berkesinambungan

### **2.1.1 Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas bisa dikatakan baik dan efektif jika mampu menjawab rasa ingin tahu publik terkait dengan informasi mengenai segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab suatu lembaga, untuk itu perlu adanya indikator-indikator mengenai akuntabilitas. Menurut KNKG (2006) yang menjadi indikator pada akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada *stakeholders*
2. Semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya
3. Adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan
4. Adanya ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan serta memiliki system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*)
5. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati

### **2.2 Transparansi**

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan .Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara lembaga-lembaga pengelola zakat dengan masyarakat sehingga tercipta pengelolaan yang bersih, efektif, efisien , akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan sebuah lembaga, dalam hal ini lembaga amil zakat, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan kinerja lembaga amil zakat dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban lembaga amil zakat kepada umat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan lembaga amil zakat yang baik dan mengurangi kesempatan praktek inefisiensi yang sering terjadi di lembaga-lembaga pengelola zakat. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah–dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab

penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pengelola zakat dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang inefisiensi di kalangan para pengelola zakat dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pemerintahan, Serta Laporan Perubahan pertanggungjawaban periode lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan. Transparansi dibangun Atas kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002). Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennet dalam Mulyana 2006).

Untuk mewujudkan transparansi informasi yang dibutuhkan diantaranya adalah laporan keuangan. Menurut Mardiasmo (2002:30) informasi ini digunakan untuk:

- a. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan
- b. Menilai kondisi keuangan dan-hasil hasil operasi
- c. Membantu menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya
- d. Membantu Dalam dan mengevaluasi tingkat efisiensi efektivitas.

Alat Ukur Transparansi Krina(2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi,yaitu :

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, Koran lokal.
2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5. Pertemuan masyarakat
6. Mimbar rakyat.

### **2.2.1. Indikator Transparansi**

Menurut KNKG (2006) prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. Adanya pemberian informasi keuangan yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, mudah diakses publik
2. Adanya pengungkapan kondisi keuangan secara menyeluruh
3. Adanya keterbukaan tidak mengurangi kerahasiaan perusahaan
4. Adanya kebijakan perusahaan yang tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholders*

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bagaimana seharusnya lembaga amil zakat memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah mereka dengan cara mentranparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga

amil zakat dan juga bagaimana lembaga amil zakat dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang diamanahkan

### **2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109**

Sistem akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

#### **2.3.1. Tujuan utama Standar akuntansi**

Mahmudi (2008) dalam bukunya sistem akuntansi organisasi pengelola zakat mengemukakan tujuan utama standar akuntansi adalah:

1. Agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami oleh oleh para pengguna laporan keuangan
2. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dan dengan pembaca laporan keuangan serta
3. Agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*)

Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu dengan adanya standar akuntansi, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar bagi auditor dalam proses audit,

karena pada dasarnya audit adalah memeriksa kesesuaian laporan keuangan yang dibuat manajemen OPZ dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.

### **2.3.2. Dimensi laporan keuangan berdasarkan PSAK no. 109**

#### **2.3.2.1. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

##### **Zakat**

###### **Pengakuan awal**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
  - (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

###### **Pengukuran setelah pengakuan awal**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

###### **Penyaluran zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

(b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Infak/Sedekah

Pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

(b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajarsesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

(a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;

(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

(b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

#### **2.3.2.2. PENYAJIAN**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### 2.3.2.3. PENGUNGKAPAN

#### Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

#### Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

- (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan

Selain membuat pengungkapan diatas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana Infaq/sedekah

### **2.3.3. Laporan Keuangan Amil**

#### **Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- (a) neraca (laporan posisi keuangan);
- (b) laporan perubahan dana;
- (c) laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan.

#### **Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

##### **Aset**

- (a) kas dan setara kas
- (b) instrumen keuangan
- (c) piutang
- (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

##### **Kewajiban**

- (e) biaya yang masih harus dibayar
- (f) kewajiban imbalan kerja Saldo dana

- (g) dana zakat
- (h) dana infak/sedekah
- (i) dana amil
- (j) dana nonhalal

### **Laporan Perubahan Dana**

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

(a) Penerimaan dana zakat

1. Bagian dana zakat
2. Bagian amil

(b) Penyaluran dana zakat

1. Entitas amil lain
2. *Mustahiq* lainnya
3. Saldo awal dana zakat
4. Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

1. Penerimaan dana infak/sedekah
2. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
3. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
4. Penyaluran dana infak/sedekah
5. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
6. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
7. Saldo awal dana infak/sedekah
8. Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

- (1) Penerimaan dana amil
- (2) Bagian amil dari dana zakat
- (3) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- (4) Penerimaan lainnya

- (5) Penggunaan dana amil
- (6) Beban umum dan administrasi
- (7) Saldo awal dana amil
- (8) Saldo akhir dana amil

Dana nonhalal

- (1) Penerimaan dana nonhalal
  - (a) Bunga bank
  - (b) Jasa giro
- (2) Penerimaan nonhalal lainnya
  - (a) Penyaluran dana nonhalal
  - (b) Saldo awal dana nonhalal
  - (c) Saldo akhir dana nonhalal

### **Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

### **Laporan Arus Kas**

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

### **Catatan atas laporan keuangan**

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

## **2.4 Aksesibilitas keuangan**

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al dalam Mulyana, 2006). Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampai-kannya ke *Muzakki* saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Akses dalam istilah keuangan memiliki arti yang sedikit agak berbeda dengan akses dalam bahasa sehari – hari. Akses sendiri berarti kemudahan dalam hal tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Sedangkan arti kata akses dalam istilah keuangan merupakan ketersediaan media (*file*, skrip, naskah, ataupun media lain) untuk dibaca atau digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya sarana penemuan informasi keuangan. Kemudahan dan kemampuan dari manajemen untuk menyajikan atau memberikan layanan informasi keuangan dan media laporan keuangan yang diminta oleh pengguna (*user*) ini diperlukan untuk memberikan layanan yang terbaik. Oleh karena itu, penataan ataupun penyusunan *file* laporan keuangan yang baik dan tersusun dengan rapi juga sangat disarankan disini.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas lembaga terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, dalam Mulyana 2006).

## **2.5 Value for Money**

*Value for Money* adalah salah satu alat pengukuran kinerja untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik dan juga digunakan untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas segala kegiatan pada organisasi sektor publik tersebut.

### 2.5.1 Pengertian *Value for Money*

*Value for Money* merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berusaha untuk mendapatkan laba (swasta) atau perusahaan yang non profit seperti perusahaan sektor publik (pemerintah). *Value for Money* adalah penilaian kinerja yang meliputi efisiensi, efektivitas dan ekonomi. Indikator kinerja dalam perusahaan yang menggunakan *Value for Money* harus menggambarkan tingkat pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomis yang terbaik. Ini artinya walaupun dengan biaya yang rendah dan murah tidak selalu yang terbaik, ini karena dengan biaya rendah dan murah tidak dapat dikatakan yang terbaik pula. Untuk lebih jelasnya mengenai *Value for Money* maka penulis menguraikan definisi *Value for Money* yang dikutip dari beberapa buku sebagai berikut.

Pengertian *Value for Money* menurut Mahmudi (2005:89) adalah, bahwa: “*Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.”

Pengertian *Value for Money* menurut *Imperial College London* (<http://www3.imperial.ac.uk/secretariat/policiesandpublications/valueformoney/> diakses pada: 2012-20-03) adalah sebagai berikut:

*“Value for Money (VfM) is the term used to assess whether or not an organisation has obtained the maximum benefit from the goods and services it acquires and or provides, within the resources available to it. It not only measures the cost of goods and services, but also takes account of the mix of quality, cost, resource use, fitness for purpose, timeliness and convenience to judge whether or not, when taken together, they constitute good value. Achieving VfM may be described in terms of the 'three Es' - economy, efficiency and effectiveness: a. Economy. Doing less with fewer resources, i.e. making savings. b. Efficiency. Doing the same as*

*before, but with fewer resources (money, staff, space). c. Effectiveness. Doing more than before with the same resources as now (or less).”*

Dari kedua definisi diatas dapat dikatakan bahwa *Value for Money* merupakan salah satu alat pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berdasar kepada tiga elemen dasar, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Inti dari *Value for Money* dapat diartikan sebagai penghargaan terhadap nilai uang atau dapat ditaksirkan seperti berikut *doing less with fewer resources*.

### **2.5.2 Pengukuran *Value for Money***

Pengukuran kinerja *Value for Money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan bahwa inti pengukuran kinerja sektor publik adalah mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, transparansi dan Akuntabilitas Publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*) dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka diperlukan indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Kualitas terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan (*fitness for purpose*), konsistensi dan kepuasan publik (*public satisfaction*). Kepuasan masyarakat dalam konteks tersebut dapat dikaitkan dengan semakin rendahnya *complaint* dari masyarakat.

### **2.5.3 Langkah – langkah Pengukuran *Value for Money***

Dalam melakukan pengukuran *Value for Money* perlu adanya langkah – langkah pengukuran *Value for Money* agar hasil dari pengukuran *Value for Money*

mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan publik. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana langkah – langkah pengukuran *Value for Money* berikut langkah – langkahnya. Menurut Mardiasmo (2002:133) langkah – langkah pengukuran *Value for Money* adalah:

“Langkah – langkah pengukuran *Value for Money*, yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi
2. Pengukuran Efisiensi
3. Pengukuran Efektivitas
4. Pengukuran *Outcome*”

Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan mengenai langkah – langkah pengukuran *Value for Money*:

**Pengukuran Ekonomi.** Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.

**Pengukuran Efisiensi.** Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *Value for Money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Dalam pengukuran kinerja *Value for Money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Efisiensi alokasi, merupakan alokasi yang terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal.
- b. Efisiensi teknis (manajerial), merupakan efisiensi yang terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkatan *output* tertentu

**Pengukuran Efektivitas.** Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal

terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi dari yang telah dianggarkan, bisa juga dua kali lebih besar dari apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**Pengukuran *Outcome*.** *Outcome* adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan.

Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu:

- a. Peran retrospektif
- b. Peran prospektif

Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran retrospektif dan peran prospektif.

a. Peran retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, analisis retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program atau proyek yang perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

b. Peran prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Sebagai peran prospektif, pengukuran *outcome* digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik.

## **2.6 PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.6.1 Hubungan Penerapan Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 terhadap Akuntabilitas lembaga amil zakat**

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo,2006).

Sementara itu dari sisi akuntansi, Ikatan akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat dengan adanya standar pelaporan ini, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas dan ini akan mendorong lembaga amal zakat untuk lebih akuntabel dan tentunya dengan adanya standar yang jelas, dana publik yang dikelola ini akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena dengan adanya standar akuntansi baik pembuat maupun pembaca laporan keuangan memiliki acuan yang jelas mengenai akuntabilitas melalui sebuah laporan keuangan jika ini terjadi maka mudah bagi para muzakki untuk mengevaluasi laporan keuangan yang dimiliki lembaga amal zakat dan hal ini pun akan mendorong manajemen LAZ untuk meningkatkan akuntabilitasnya Dalam penelitian Hendrawan (2010) PSAK no 45 memiliki pengaruh positif dalam perwujudan akuntabilitas rumah sakit. Dengan kata lain, pelaksanaan standar akuntansi pada suatu lembaga akan meningkatkan akuntabilitas pada lembaga tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Diduga Penerapan laporan keuangan berdasarkan psak no 109 berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas lembaga amal zakat

### **2.6.2 Hubungan Aksesibilitas keuangan terhadap Akuntabilitas lembaga amal zakat**

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones

et al dalam Mulyana, 2006) oleh karena itu lembaga amil zakat harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar menyampaikannya ke *muzakki* saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Pendapat lain pun muncul untuk menghubungkan akuntabilitas dan aksesibilitas. pendapat ini yang menguatkan penulis akan penelitian ini dan maka seperti ini pendapat yang dimaksud:

“Halim (2002) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen”.

Lembaga amil zakat perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Jika masyarakat diberi akses untuk memperoleh informasi keuangan lembaga amil zakat maka tidak akan ada lagi sekat informasi antara lembaga amil zakat dan masyarakat sebagai muzakki dan ini berarti sudah tersedia ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Ini menandakan bahwa semakin baik aksesibilitas keuangan suatu lembaga maka semakin baik pula akuntabilitasnya, karena pada dasarnya akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Kadarmi (2007) aksesibilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Seperti penelitian Mulyana (2006) yang juga menemukan pengaruh positif aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara aksesibilitas keuangan dengan akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Diduga aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas lembaga amil zakat

### 2.6.3 Hubungan *Value for Money* terhadap Akuntabilitas lembaga amil zakat

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha, menyebabkan persaingan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya Akuntabilitas Publik pada perusahaan publik dan semakin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi publik dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan. Untuk mencapai Akuntabilitas Publik yang baik dengan digunakannya pengukuran kinerja *value for money*. Maka menurut Mardiasmo (2002:121) menyatakan bahwa: "Akuntabilitas Publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjaka secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*).” Sedangkan menurut Nordiawan (2006:270) menyatakan bahwa: "Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain”:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan Akuntabilitas Publik.

Bastian (2006:74) menyatakan, bahwa: “Asumsi UU No. 17/2003 membawa Akuntabilitas hasil sebagai notasi yang pertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”

Suatu organisasi atau perusahaan pemerintah atau publik dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terlepas dari bagaimana kinerja perusahaan tersebut mencapai hasil yang ditargetkan oleh perusahaan. Dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan atas kinerja, manajemen memerlukan adanya laporan untuk menganalisis aktivitas kinerja tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari standar atau dari criteria yang ditetapkan agar segera dapat diambil suatu tindakan perbaikan kualitas kinerja perusahaan dan para pegawai perusahaan. Tugas audit internal adalah untuk melakukan tugas-tugas pemeriksaan terhadap bagaimana akuntabilitas publik berjalan pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena bahwa hanya para satuan pengawas internal saja yang dapat menilai bagaimana kinerja yang baik menghasilkan Akuntabilitas yang baik pula, yang sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan dan umum. Mardiasmo (2006) dalam penelitiannya ia menemukan pengaruh positif *value for money* terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan kata lain semakin baik pelaksanaan *value for money* pada suatu lembaga maka semakin baik pula akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka menghasilkan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Diduga *value for money* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas lembaga amil zakat

#### **2.6.4 Hubungan antara penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 terhadap transparansi lembaga amil zakat**

Implikasi dari belum adanya Kriteria transparansi dan akuntabilitas keuangan publik ini adalah ketidakpahaman penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Akibatnya penyusun laporan keuangan tidak memenuhi syarat pembuatan laporan keuangan yang baik. Selain itu, untuk

memenuhi kriteria transparansi dalam laporan keuangan, pembuat laporan akan menggunakan penilaian subjektifnya saja sehingga laporan keuangan tersebut dianggap sudah akuntabel dan transparan.

Supaya pembuat laporan keuangan tidak mengalami kerancuan mengenai bentuk laporan keuangan maka perlu adanya kriteria yang jelas mengenai kriteria transparansi dalam laporan keuangan, khususnya laporan keuangan publik. Selain itu, akan ada standar pembuatan laporan sehingga masing-masing penyusun laporan tidak menggunakan penilaian subjektif lagi untuk menentukan apakah laporan yang dia buat sudah memenuhi kriteria transparan atau belum. Dengan menerapkan standar akuntansi yang sesuai, nantinya akan mendorong lembaga amil zakat untuk lebih sadar dan percaya diri dalam mempublikasikan laporan keuangannya karena laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan pemerintah. Ini berarti semakin baik pelaksanaan standar akuntansi di sebuah lembaga akan semakin meningkatkan transparansi suatu lembaga.

Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi dalam Mulyana, 2006). Menurut IMF transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ada ketersediaan informasi kepada publik, ada proses penganggaran yang terbuka serta ada jaminan integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi dan penjabarannya (Schiavo-Campo and Tomasi dalam Mulyana, 2006). Dalam penelitian Hendrawan (2010) PSAK no 45 memiliki pengaruh positif dalam perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan rumah sakit.

Dengan kata lain, pelaksanaan standar akuntansi pada suatu lembaga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Diduga penerapan laporan keuangan berdasarkan Psak No. 109 berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

#### **2.6.5 Hubungan antara Aksesibilitas keuangan dan transparansi lembaga amil zakat**

Dalam konteks pengelolaan dana zakat, transparansi menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat khususnya lembaga amil zakat (LAZ) sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses (aksesibilitas) bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain piagam organisasi dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. Audit eksternal untuk mendorong transparansi organisasi-organisasi pengelola zakat, sesuatu yang sejauh ini belum dilakukan, dengan demikian, akuntabilitas organisasi-organisasi modern menjadi jelas (Herlina,2004) untuk itu lembaga amil zakat perlu untuk meningkatkan transparansinya melalui ketersediaan akses terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan lembaga amil zakat. Jika itu dilakukan maka lembaga amil zakat dinilai akan semakin transparan. Karena jika lembaga amil zakat memberikan akses yang mudah terhadap pengguna laporan keuangan tentunya telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan lembaga amil zakat, jika semakin banyak orang yang mengetahui informasi keuangan sebuah lembaga maka bisa dikatakan semakin transparan juga lembaga tersebut.

Penelitian yang dilakukan Kadarmi (2007) menunjukkan aksesibilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Seperti penelitian Mulyana (2006) yang juga menemukan pengaruh positif aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara aksesibilitas keuangan dengan akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Diduga Aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

#### **2.6.6 Hubungan antara *Value for Money* terhadap transparansi lembaga amil Zakat**

Lembaga Amil zakat merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada profit, dan kebanyakan sumber dana dihimpun dari masyarakat umum oleh

karena itu diperlukan pengelolaan LAZ yang profesional menuju terciptanya suatu lembaga publik yang berorientasi pada *value for money*. *value for money* merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja sektor publik yang didasarkan pada kriteria efektif, efisien dan ekonomis.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Salah satu tujuan dari organisasi sektor publik adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat yang konteksnya dalam penelitian ini adalah para muzakki, dengan membuat sebuah pertanggungjawaban yang transparan. Dengan kata lain jika lembaga amil zakat sudah melaksanakan prinsip *value for money* maka manajemen lembaga amil zakat akan terdorong untuk mempublikasikannya kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan terhadap lembaganya. Mardiasmo (2006) dalam penelitiannya ia menemukan pengaruh positif *value for money* terhadap akuntabilitas dan transparansi. Dengan kata lain, semakin baik pelaksanaan *value for money* pada suatu lembaga maka semakin baik pula akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut.

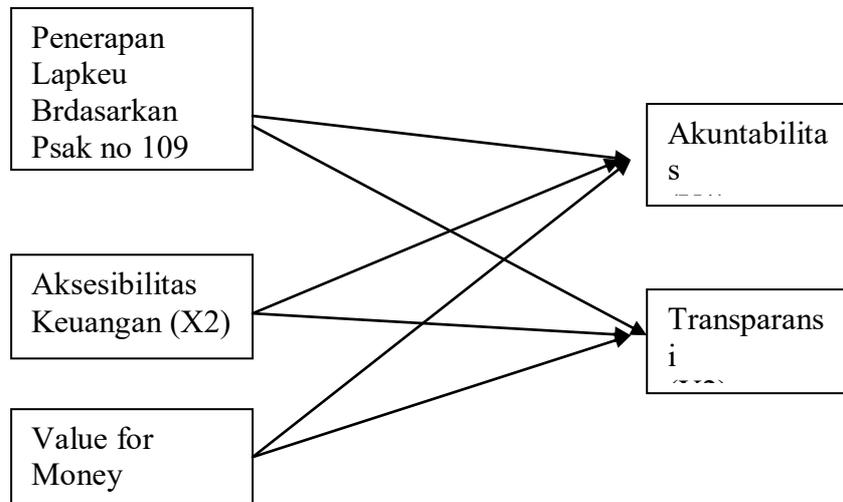
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis keenam sebagai berikut:

H6: Diduga *value for money* berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

## 2.7 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambar berikut merupakan model penelitian mengenai hubungan antara Penerapan Lapkeu berdasarkan PSAK No. 109, Aksesibilitas keuangan dan *Value for money* yang merupakan variabel independen dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel dependen.

### Gambar 2.1



STIE BPD Jateng

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi konsep**

Definisi konsep adalah suatu definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Situmorang dkk, 2008:34). Konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, dua variabel dependen:

##### **3.1.1. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Nomor 109 (X<sub>1</sub>)**

Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Menurut Sugiyono (2009:39), variabel independen atau disebut juga dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Penyajian suatu laporan keuangan dimaksudkan bagaimana laporan keuangan tersebut dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan itu diungkapkan melalui berbagai cara pengungkapan. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan.

##### **3.1.2. Aksesibilitas keuangan (X<sub>2</sub>)**

Aksesibilitas keuangan merupakan ketersediaan media (*file*, skrip, naskah, ataupun media lain) untuk dibaca atau digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya sarana penemuan informasi keuangan. Kemudahan dan kemampuan dari manajemen untuk menyajikan atau memberikan layanan informasi keuangan dan media laporan keuangan

### 3.1.3. Value For Money ( $X_3$ )

*Value for Money* adalah salah satu alat pengukuran kinerja untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik dan juga digunakan untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas segala kegiatan pada organisasi sektor publik tersebut. (Mardiasmo, 2002:133)

### 3.1.4. Akuntabilitas dan Transparansi (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Variabel dependen atau disebut juga dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas) (Sugiyono, 2009:39).

- a. **Akuntabilitas ( $Y_1$ )** dapat didefinisikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas laporan keuangan berarti pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan wajar. Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini dikembangkan dari Pedoman *Good Corporate Governance* mengenai akuntabilitas.
- b. **Transparansi ( $Y_2$ )** didefinisikan sebagai kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan mudah diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Transparansi laporan keuangan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban entitas dalam pengelolaannya.

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, mengungkapkan hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan lainnya. Indikator transparansi dalam penelitian ini dikembangkan dari Pedoman *Good Corporate Governance* mengenai transparansi

### 3.2. Definisi Operasional

Menurut M. Nasir dalam Situmorang dkk 2008:40, definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengakui variabel tersebut. Variabel penyajian Laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109, aksesibilitas keuangan dan *value for money* dalam penelitian ini merupakan variabel independen yang disebut juga variabel sebab ( *presumed cause variable* ) dan ditandai dengan notasi X. Variabel ini diukur dengan instrument yang dikembangkan berdasarkan definisi Dari penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109, aksesibilitas keuangan, dan *value for money* Sedangkan variabel akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan merupakan variabel dependen yang disebut juga variabel akibat ( *presumed effect* ) dan ditandai dengan notasi Y1 untuk akuntabilitas, serta Y2 untuk variabel transparansi variabel ini diukur dengan instrumen berdasarkan indikator akuntabilitas dan transparansi yang dikembangkan berdasarkan definisi variabel tersebut serta dari Pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Keempat variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala kontinu, yaitu skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan pengukuran peringkat *construct* yang diukur dan menunjukkan suatu urutan tingkat preferensi. operasionalisasi kedua variabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel Independen (X<sub>1</sub>)**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Independen (X1): Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.109	a. Pengakuan	1. Adanya akun-akun yang memenuhi suatu unsur laporan keuangan 2. Adanya atribut pengukuran yang relevan dan andal 3. Adanya informasi yang mendukung pengambilan keputusan 4. Laporan keuangan menyajikan keadaan yang sebenarnya	Kontinu
	b. Pengukuran	a. Menggunakan atribut nilai perolehan ( <i>historical cost</i> ) dalam mengukur transaksi ZIS (Muhammad, 2008:113) b. Menggunakan atribut nilai pasar sekarang ( <i>current market value</i> ) dalam mengukur <i>asset nonkas</i>	
	c. Pengungkapan	Adanya pengungkapan dalam tanda kurung dan catatan kaki maupun maupun berupa catatan atas laporan keuangan. (Bastian, 2006:97)	
	d. Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).	

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel Independen (X<sub>2</sub>)

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Independen (X <sub>2</sub> ) Aksesibilitas Keuangan dan Saufi Iqbal (2009)	a. Keterbukaan	Laporan keuangan lembaga amil zakat dipublikasikan secara terbuka melalui media massa	Kontinu
	b. Ketersediaan	Laporan keuangan lembaga amil zakat tersedia dan dapat diakses	

**Tabel 3.3**  
**Operasionalisasi Variabel Independen (X<sub>3</sub>)**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Variabel Independen (X <sub>3</sub> ) Value For Money (Mardiasmo:2005)	a. Ekonomi	<p>a. menggunakan harga terendah dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran</p> <p>b. menggunakan biaya trendah dalam pengadaan barang</p> <p>c. mengeluarkan biaya sesuai kebutuhan dan tidak melebihi anggaran</p> <p>d. melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan kualitas terbaik</p> <p>e. melaksanakan program berturut-turut dengan biaya di tahun ke-2 lebih kecil dari tahun sebelumnya</p>	Kontinu
	b. Efisiensi	<p>a. memilih strtegi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan</p> <p>b. pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat</p> <p>c. penghilangan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat dan justru membebani anggaran</p>	
	c. Efektifitas	<p>a. Mengacu pada visi dan misi organisasi</p> <p>b. menghasilkan pelayanan publik yang baik</p> <p>c. meningkatkan partisipasi</p>	

		masyarakat	
	d. <i>Outcome</i>	adanya dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat.	

**Tabel 3.4**

**Operasionalisasi Variabel dependen (Y)**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga amil zakat KNKG (2006)	a. Akuntabilitas Lembaga amil zakat (Y <sub>1</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemberian informasi dan pengungkapan (<i>disclosure</i>) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada <i>stakeholders</i></li> <li>2. Semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya</li> <li>3. Adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan</li> <li>4. Adanya ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan serta memiliki system penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment</i>)</li> <li>5. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>) yang telah disepakati</li> </ol>	Kontinu
	b. Tranparansi Lembaga amil zakat (Y <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemberian informasi keuangan yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, mudah diakses publik</li> <li>2. Adanya pengungkapan kondisi keuangan secara menyeluruh</li> <li>3. Adanya keterbukaan tidak mengurangi kerahasiaan perusahaan</li> <li>4. Adanya kebijakan perusahaan yang tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i></li> </ol>	

**3.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

**3.3.1. Populasi**

Sugiyono (2009:72) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dengan demikian populasi merupakan obyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lembaga amal zakat maupun lembaga sosial yang menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah yang keberadaannya telah diakui oleh pemerintah ataupun sudah terdaftar melalui akta notaris di kota Semarang

### **3.3.2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2009:81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sedangkan teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, yaitu yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009:85). Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 30 unit. Dalam penelitian ini semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel yang diambil terdiri dari 1 (satu) responden di masing-masing LAZ yang memiliki hubungan dengan bahasan penelitian, yaitu pimpinan LAZ yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan entitas, atau bagian akuntansi yang memahami prosedur pelaporan keuangan LAZ.

### **3.4. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) dan wawancara terstruktur dengan pihak manajemen LAZ. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:142). Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang telah ditentukan alternatif jawabannya dari setiap pernyataan atau pertanyaan yang telah tersedia. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kontinu. Kuesioner dibuat dalam bentuk pilihan ganda dengan sepuluh butir opsi jawaban untuk setiap pertanyaannya. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap pertanyaan kuesioner yang menggunakan skala kontinu diberi skor 1-10. Skor 10 merupakan nilai skor tertinggi dan skor 1 merupakan nilai skor terendah dengan gradasi skor dari sangat positif sampai sangat negatif. Penilaian skor misalnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jawaban yang semakin mendekati angka 0 berarti cenderung tidak setuju dan tidak pernah
  2. Jawaban yang semakin mendekati angka 10 berarti cenderung setuju dan selalu
- Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kemudian dianalisis untuk menilai variabel yang diteliti dengan membandingkan jumlah skor jawaban dari responden dengan skor ideal/kriterium instrumen sehingga dapat ditarik kesimpulan jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan.

Sedangkan wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis berupa hasil jawaban instrumen kuesioner (angket) tertutup dari responden serta hasil wawancara dengan responden, yang diperoleh melalui pihak manajemen LAZ yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) berupa standar akuntansi dan pedoman yang diperoleh dengan mengunduh data dari media internet.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang diberikan responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu SPSS 16.

### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel atau deskripsi suatu data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi (Ghozali, 2011:19). Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden yang dilihat dari nilai rata-rata dan standar deviasi yang diungkapkan untuk memperjelas deskripsi (Ghozali, 2011:19).

Peneliti memperoleh gambaran demografi responden berupa: *gender*, umur, jenjang pendidikan, status, dan jabatan. Identitas responden ini sekiranya dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan, *value for money* serta akuntabilitas dan transparansi)

### 3.5.2 Uji Validitas

Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekaran (2006:204) bahwa "*validity tests how well an instrument that is developed measures the particular concepts it is supposed to measure*". Pengujian validitas tiap butir pertanyaan/pernyataan dalam instrumen menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. Sugiyono (2007:124) mengutip pendapat Masrun (1979) bahwa "Teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang

merupakan teknik yang paling banyak digunakan” Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun menyatakan ‘item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Nilai  $r$  yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai  $r$  dalam tabel korelasi  $r$ . Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka item pertanyaan tersebut valid. Sebaliknya, jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka item pertanyaan tersebut tidak valid.

### 3.5.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali,2005:41). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Jika jawaban terhadap indikator ini acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak reliabel (Ghozali,2005:42).

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang. Di sini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah orang tersebut tetap konsisten dengan jawabannya.
2. *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*.

Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila (Ghozali,2005:42) : Hasil  $\alpha > 0,60 =$  reliabel dan Hasil  $\alpha < 0,60 =$  tidak reliabel

### 3.5.4 Regresi Linier Berganda

Analisa regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari setiap

peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat.

Untuk menguji  $H_1$ ,  $H_2$  dan  $H_3$  menggunakan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y_1 = \beta_1 0 + \beta_1 1 + \beta_1 2 + \beta_1 3 + \dots e$$

Untuk menguji  $H_4$ ,  $H_5$  dan  $H_6$  menggunakan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y_2 = \beta_2 0 + \beta_2 1 + \beta_2 2 + \beta_2 3 + \dots e$$

Dimana:

$\beta_1 0$  dan  $\beta_2 0$  = konstanta

$\beta_1$  dan  $\beta_2$  = koefisien regresi

$Y_1$  = akuntabilitas

$Y_2$  = transparansi

1 = Penerapan Laporan keuangan berdasarkan psak no 109

2 = aksesibilitas keuangan

3 = value for money

$e$  = error

#### 3.5.4.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap model penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian model tersebut apakah memenuhi asumsi klasik regresi, yang terdiri dari (Ghozali, 2005: 89) :

##### 1) Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:110). Untuk menguji apakah terdapat distribusi normal atau tidak dalam model regresi maka digunakan analisis grafik dan uji statistik. :

1. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot*. Dasar pengambilannya adalah:

- a. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan /atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas.

2. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusannya yaitu nilai signifikansi  $> 0,05$  maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

## 2) Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (0). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali,2005:92) :

- a). Mempunyai angka Tolerance diatas ( $>$ ) 0,1
- b). Mempunyai nilai VIF di di bawah ( $<$ ) 10

## 3) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2005: 105).

Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik, apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2005:105).

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Selain itu untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan Glejser test (Ghozali, 2006). Uji Glejser ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila tidak terdapat satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual (AbsUt) dan dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### **3.5.4.2 Uji Kebaikan Model**

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*nya. Tujuan dari uji kebaikan model ini adalah untuk menentukan seberapa baik model yang digunakan cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, dan nilai statistik F (Ghozali, 2006).

#### a). Koefisien Determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* untuk mengevaluasi model regresi penelitian.

#### b). Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006). Uji F untuk menguji kebaikan model regresi (*goodness of fit*) yang digunakan maksudnya untuk menguji seberapa baik data sample penelitian *fit* dengan model regresi yang diajukan dalam penelitian. Jika model regresi cukup *fit* berarti pengujian dapat dilanjutkan ke tahap uji statistik t (Ghozali, 2006).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha=0.05$ ), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Apabila taraf signifikansi observasi  $\leq 0.05$  maka hipotesis alternatif dapat diterima, artinya variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel – variabel dependen.
- b. Apabila taraf signifikansi observasi  $>0,05$  maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel – variabel dependen.

### 3.5.4.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan pengujian yaitu uji – t

#### Uji – t

Untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial dengan  $\alpha = 0,05$  dan juga penerimaan atau penolakan hipotesa, maka cara yang dilakukan adalah :

Merumuskan hipotesis

1.  $H_{01}: \beta_1 = 0$  berarti Penerapan laporan keuangan berdasarkan psak no 109 tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat

$H_{a1}: \beta_1 > 0$  berarti penerapan laporan keuangan berdasarkan psak no 109 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat

2.  $H_{02}: \beta_2 = 0$  berarti aksesibilitas keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat

$H_{a2}: \beta_2 > 0$  berarti aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat

3.  $H_{03}$ :  $\beta_3 = 0$  berarti value for money tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat

$H_{a3}$ :  $\beta_3 > 0$  berarti value for money berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat

4.  $H_{04}$ :  $\beta_4 = 0$  berarti penerapan laporan keuangan berdasarkan psak no 109 tidak berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

$H_{a4}$ :  $\beta_4 > 0$  berarti penerapan laporan keuangan berdasarkan psak no 109 berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

5.  $H_{05}$ :  $\beta_5 = 0$  berarti aksesibilitas keuangan tidak berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

$H_{a5}$ :  $\beta_5 > 0$  berarti aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

6.  $H_{06}$ :  $\beta_6 = 0$  value for money tidak berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

$H_{a6}$ :  $\beta_6 > 0$  berarti value for money berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansinya  $\leq 0,05$  maka hipotesis alternatif dapat diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

STIE BPD Jateng

**BAB IV**  
**ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

**4.1.1 Gambaran Responden**

Populasi pada penelitian ini adalah lembaga amil zakat yang ada di Semarang berdasarkan data yang dimiliki oleh Forum Zakat (FOZ) kota Semarang pada tahun 2012 sejumlah 25 lembaga akan tetapi dengan alasan perbaikan sistem hanya 20 lembaga yang bersedia menjadi responden dan mengembalikan kuesioner. Berikut adalah daftar lembaga, yayasan yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4.1  
Data lembaga amil zakat

No	Nama Lembaga / Yayasan	Alamat
1.	Rumah Zakat	Jl. Dr. Sutomo no.53 Semarang
2.	Dompot Dhuafa	Jl. Abdulrahman Saleh Blok D No. 199 Manyaran Semarang
3.	Lazismu (Muhammadiyah)	Jl. Singosari Raya no. 33 Semarang
4.	DPU DT	Jl. Dr. Wachidin G 08
5.	Lazisnu (Nahdatul Ulama)	Jl. Jenderal Soedirman No. 49 Semarang
6.	Lazisba (Masjid Baiturrachman)	Komplek Perkantoran Masjid Baiturrahman Semarang Jl. Pandanaran no 126 Semarang
7.	Lazisma (Masjid Agung Jawa Tengah)	Komplek Perkantoran MAJT It 2 no 209 Jl. Gajah raya
8.	Laznas BSM	BSM cab. Semarang Jl. Pandanaran no 104 Semarang
9.	BP ZIS Mandiri Club	Jl. Pemuda no. 73 Semarang It 2
10.	Lazis Jateng	Jl. Karangrejo raya no.224 Jatingaleh
11.	Yatim Center	Jl. Karangrejo tengah XII no 12 Semarang
12.	LSM MBI	Komplek perkantoran Lazis Jateng Jl. Karang rejo raya no 224 Semarang
13.	PPPA Darul Qur'an	Jl Gajah Raya No 111 Smg
14.	Yayasan Nurul Hayat	Jl. Raya Majapahit No. 209
15.	Yatim Mandiri	Jl. Menteri Supeno 1/22 Semarang
16.	Baitul Mal Hidayatullah (BMH)	Jl. Watulawang II/23 papandayan Gajahmungkur Semarang
17.	Lazimas (Masjid Agung Semarang)	Kompleks Masjid Agung Semarang Jl. Alun-alun barat No. 71 Semarang

18.	YBM BRI	BRI Kanwil Jl. Teuku umar no 24 semarang
19.	Yayasan Aitam Indonesia	Jl. Tusam timur 35a Banyumanik
20.	UPZ BNI Syariah	Jl. Ahmad Yani no 152 Semarang

Sebelum menganalisis jawaban-jawaban responden terhadap keterkaitan beberapa faktor dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden. Gambaran umum responden diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban terhadap kuesioner. Dari informasi demografis yang mengisi kuesioner secara penuh, terlebih dahulu akan disajikan mengenai gambaran demografis dari responden tersebut diantaranya berisi tentang informasi mengenai jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Profil responden penelitian akan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2  
Profil Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	10	50,0
Perempuan	10	50,0
<b>Bagian</b>		
Keuangan	12	60,0
Operasional	2	10,0
Direktur	4	20,0
Pimpinan Cabang	2	10,0
<b>Pendidikan</b>		
D3	8	40,0
S1	12	60,0
<b>Umur (tahun)</b>		
20 – 29	10	50,0
30 – 39	8	40,0

---

Sumber : Data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa subyek yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing sebanyak 10 orang atau 50,00%.

Dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, jabatan responden terbanyak adalah sebagai bagian keuangan yaitu sebanyak 12 orang (60,0%), diikuti dengan yang menjabat sebagai ketua atau direktur sebanyak 4 orang atau 20,0%. dan sisanya masing-masing 2 orang atau 10,0% menjabat sebagai bidang operasional dan pimpinan cabang jadi dapat dipastikan bahwa .

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden terbanyak adalah yang memiliki pendidikan Sarjana S1 yaitu sebanyak 12 orang (60,0%), sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau 40% memiliki tingkat pendidikan diploma 3 atau D3.

Berdasarkan umur, sebagian besar responden berumur antara 20 – 29 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 50,0% dan diikuti dengan kelompok umur dari 30 – 40 tahun sebanyak 8 orang atau 40,00%. Kondisi demikian menunjukkan bahwa rata-rata responden berumur pada kisaran 30 tahunan yang berarti masih relatif muda.

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1. Statistik Deskriptif

Diskripsi variabel disini dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel

Tabel 4.3  
Diskripsi Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
--	---	---------	---------	------	----------------

Akuntabilitas	20	34	45	40.20	3.019
Transparansi	20	65	82	74.15	4.184
Penerapan PSAK	20	71	88	80.50	4.007
Akseibilitas	20	26	34	30.30	2.203
Value for Money	20	78	98	89.90	5.543

Jika dikonfirmasi dengan ukuran teoritis dari masing-masing variabel yang didasarkan pada jumlah dan nilai dari masing-masing pengukurnya maka dapat dipertimbangkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.4  
Kualifikasi Masing-masing Variabel

Variabel	Item valid	Ukuran	Teoritis	Empiris	Ket
Akuntabilitas	5	Minimum	5	34	Tinggi
		Maksimum	50	45	
		Mean	27,5	40,20	
		Rendah	5,00 – 20,00		
		Sedang	20,01 – 35,00		
Tinggi	35,01 – 50,00				
Transparansi	10	Minimum	10	65	Tinggi
		Maksimum	100	82	
		Mean	55	74,15	
		Rendah	10,00 – 40,00		
		Sedang	40,01 – 70,00		
Tinggi	70,01 – 100,00				
Penerapan PSAK	11	Minimum	11	71	Tinggi
		Maksimum	110	88	
		Mean	57,5	80,50	
		Rendah	11,00 – 44,00		
		Sedang	44,01 – 77,00		
Tinggi	77,01 – 110,00				
Akseibilitas	4	Minimum	4	26	Tinggi
		Maksimum	40	34	
		Mean	22	30,30	
		Rendah	4,00 – 16,00		
		Sedang	16,01 – 28,00		
Tinggi	28,01 – 40,00				

Value for Money	12	Minimum	12	78	Tinggi
		Maksimum	120	98	
		Mean	66	89,80	
		Rendah	12,00 – 48,00		
		Sedang	48,01 – 84,00		
		Tinggi	84,01 – 120,00		

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variabel Tingkat Akuntabilitas menunjukkan rata-rata empiris sebesar 40,20 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu 27,5. Hal ini menunjukkan subyek penelitian secara umum mendapatkan bahwa Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat akuntabilitas yang relatif besar. Jika dikategorisasikan dalam 3 kelompok, rata-rata empiris tingkat pendidikan sebesar 40,20 tersebut berada pada kategori **Tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kelompok sampel memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Variabel Transparansi menunjukkan rata-rata empiris sebesar 74,15 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu 55. Hal ini menunjukkan subyek penelitian secara umum mendapatkan bahwa lembaga amil zakat memiliki transparansi yang relatif besar. Jika dikategorikan dalam 3 kelompok, rata-rata empiris transparansi sebesar 74,15 tersebut berada pada kategori tinggi. Dengan kata lain, transparansi lembaga amil zakat memiliki transparansi yang baik.

Variabel Penerapan PSAK menunjukkan rata-rata empiris sebesar 80,50 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu 57,5. Hal ini menunjukkan subyek penelitian secara umum mendapatkan bahwa badan amil zakat secara umum sudah menerapkan standar PSAK dalam akuntansinya. Jika dikategorikan dalam 3 kelompok, rata-rata empiris penerapan PSAK 109 sebesar 80,50 tersebut berada pada kategori tinggi.

Variabel Aksebilitas menunjukkan rata-rata empiris sebesar 30,30 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu 22. Hal ini menunjukkan subyek penelitian secara umum memiliki aksebilitas yang baik. Jika dikelompokkan dalam kategori 3 kelompok, maka rata-rata empiris sebesar 30,30 tersebut berada pada kategori **tinggi**. Hal ini menunjukkan adanya aksebilitas yang tinggi.

Variabel *Value for money* menunjukkan rata-rata empiris sebesar 89,80 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu 66. Hal ini menunjukkan subyek penelitian secara umum mendapatkan bahwa badan amil zakat sudah menerapkan konsep *value for money* yang relatif tinggi. Jika dikelompokkan dalam kategori 3 kelompok, maka rata-rata empiris *value for money* sebesar 89,80 tersebut berada pada kategori tinggi.

#### 4.2.2. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dimaksudkan untuk menghindarkan adanya bias yang diperoleh dari data penelitian dalam menjelaskan konstruk variabel yang akan diukur. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha.

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel / Indikator	Korelasi	r tabel	keterangan	
1	Akuntabilitas				
		1	0.698	0,444	Valid
		2	0.805	0,444	Valid
		3	0.877	0,444	Valid
		4	0.760	0,444	Valid
	5	0.679	0,444	Valid	
2	Transparansi				
		1	0.584	0,444	Valid
		2	0.638	0,444	Valid
		3	0.478	0,444	Valid
		4	0.531	0,444	Valid
		5	0.604	0,444	Valid
		6	0.482	0,444	Valid
		7	0.488	0,444	Valid
	8	0.707	0,444	Valid	

	9	0.495	0,444	Valid
	10	0.479	0,444	Valid
3	Penerapan PSAK			
	1	0.593	0,444	Valid
	2	0.526	0,444	Valid
	3	0.543	0,444	Valid
	4	0.468	0,444	Valid
	5	0.485	0,444	Valid
	6	0.562	0,444	Valid
	7	0.571	0,444	Valid
	8	0.552	0,444	Valid
	9	0.579	0,444	Valid
	10	0.459	0,444	Valid
	11	0.493	0,444	Valid
4	Akseibilitas			
	1	0.773	0,444	Valid
	2	0.651	0,444	Valid
	3	0.620	0,444	Valid
	4	0.795	0,444	Valid
5	Value for Money			
	1	0.557	0,444	Valid
	2	0.557	0,444	Valid
	3	0.577	0,444	Valid
	4	0.549	0,444	Valid
	5	0.514	0,444	Valid
	6	0.484	0,444	Valid
	7	0.477	0,444	Valid
	8	0.692	0,444	Valid
	9	0.520	0,444	Valid
	10	0.656	0,444	Valid
	11	0.519	0,444	Valid
	12	0.475	0,444	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,444 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 20.

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil

pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6  
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,813	Reliabel
Transparansi	0,733	Reliabel
Penerapan PSAK	0,727	Reliabel
Akseibilitas	0,677	Reliabel
Value for Money	0,780	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

#### 4.3 Analisis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi liner berganda dimana terdapat dua model yaitu pengaruh Penerapan PSAK No 109, Aksesibilitas dan *Value for Money* terhadap Akuntabilitas dan Transparansi.

##### 4.3.1. Variabel Akuntabilitas :

###### 4.3.1.1. Uji Asumsi Klasik

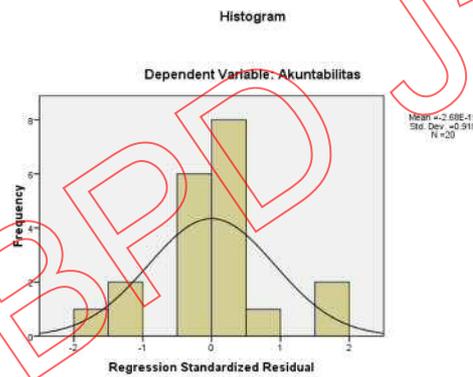
Dalam pengujian yang menggunakan teknik analisis regresi berganda, maka data-data yang digunakan harus memenuhi beberapa uji asumsi, uji tersebut terdiri dari :

###### 1. Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi, Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual model regresi. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada gambar pengujian berikut ini.

Gambar 4.1

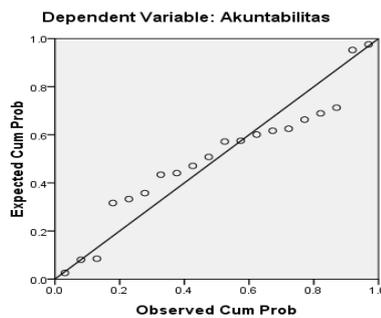
Histogram



Gambar 4.2

Grafik Uji Plot p-p

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tabel 4.7  
Uji normalitas residual

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.20092376
Most Extreme Differences	Absolute	.170
	Positive	.170
	Negative	-.151
Kolmogorov-Smirnov Z		.761
Asymp. Sig. (2-tailed)		.608

a. Test distribution is Normal.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan *residual* (kesalahan pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan nilai residual yang dekat dengan garis diagonal. Nilai Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan lebih besar dari 0,05.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Pengujian multikolinieritas dilakukan pada model regresi. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut

Tabel 4.8  
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Nilai		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerapan PSAK	0.473	2.112	Bebas multikolinieritas
Akseibilitas	0.466	2.145	Bebas multikolinieritas
<i>Value for Money</i>	0.502	1.993	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

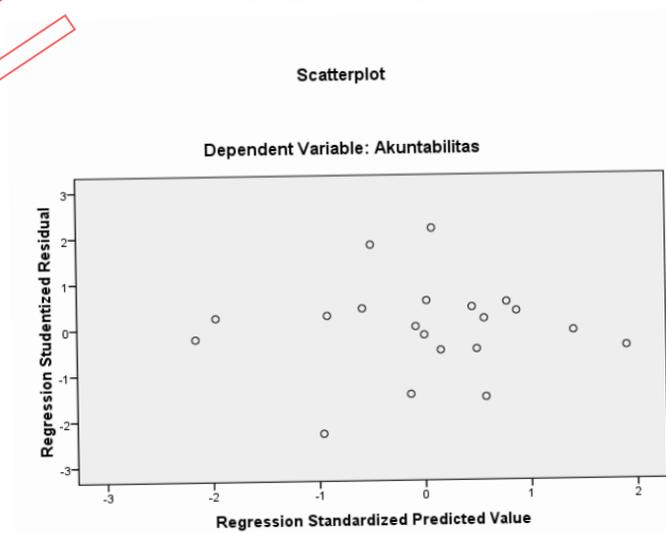
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregreskan seluruh variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika tidak terdapat hasil yang signifikan, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

Gambar 4.3

Grafik Scatter Plot



Tabel 4.9  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.674	4.054		.660	.519
Penerapan PSAK	-.063	.071	-.302	-.889	.387
Akseibilitas	-.086	.131	-.225	-.658	.520
Value for Money	.065	.050	.430	1.304	.211

a. Dependent Variable: AbsRes1

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara prediktor dengan nilai residualnya. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas.

#### 4.3.1.2. Hasil Regresi

##### 1. Model Regresi

Hasil pengujian hipotesis 1 - 3 dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.10  
Model Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-12.986	6.193		-2.097	.052
Penerapan PSAK	.279	.109	.370	2.559	.021
Akseibilitas	.429	.200	.313	2.151	.047
Value for Money	.197	.076	.362	2.581	.020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Model persamaan diperoleh sebagai berikut :

$$Y_1 = -12.986 + 0,279 X_1 + 0,429 X_2 + 0,197 X_3 + e$$

Diperoleh bahwa semua variabel memiliki koefisien regresi dengan arah positif yang menunjukkan adanya potensi peningkatan akuntabilitas yang berasal dari variasi penerapan PSAK No 109, aksesibilitas dan *value for money*.

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar = -12.986. Artinya adalah apabila penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan, dan *Value for Money* dalam keadaan tetap atau konstan maka akuntabilitas bernilai negative 12,986 yang artinya akuntabilitas menurunun sebesar 12,986 satuan.
2. Koefisien regresi penerapan PSAK No.109 ( $b_1$ ) = 0,279. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap Penerapan PSAK No. 109 akan mampu meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,279 satuan dengan asumsi aksesibilitas keuangan dan *Value for money* dalam keadaan tetap
3. Koefisien regresi aksesibilitas keuangan ( $b_2$ ) = 0,429 Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap aksesibilitas keuangan akan mampu meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,429 satuan dengan asumsi penerapan PSAK No. 109, *Value for Money* dalam keadaan tetap.
4. Koefisien regresi *Value for Money* ( $b_3$ ) = 0,197. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap *Value for Money* akan mampu meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,197 satuan dengan asumsi penerapan PSAK No. 109 dan aksesibilitas keuangan dalam keadaan tetap.

#### 4.3.1.3 Uji Kebaikan Model

##### 1. Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh dari variable penerapan PSAK No.109, aksesibilitas dan *value for money* terhadap Akuntabilitas ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 <sup>a</sup>	.842	.812	1.309

a. Predictors: (Constant), Value for Money, Penerapan PSAK, Akseibilitas

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dari model regresi diperoleh sebesar 0,812, yang berarti bahwa 81,2% akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel penerapan PSAK No. 109, aksesibilitas dan *value for money*, sedangkan sisanya 18,8% akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

## 2. Uji Model Keseluruhan (Uji F)

Untuk menguji keberartian model secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil pengujian model secara keseluruhan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.12  
Uji Model  
ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.798	3	48.599	28.377	.000 <sup>a</sup>
	Residual	27.402	16	1.713		
	Total	173.200	19			

a. Predictors: (Constant), Value for Money, Penerapan PSAK, Akseibilitas

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Hasil pengujian model secara keseluruhan menunjukkan nilai F sebesar 28,377 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, model pengujian dengan menggunakan variabel penerapan PSAK No. 109, aksesibilitas dan *value for money* sebagai model yang baik sehingga bisa dilakukan pengujian selanjutnya.

### 4.3.1.4. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara Penerapan PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan, dan *Value for Money* terhadap akuntabilitas secara parsial, pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa.

## **2. Pengujian Hipotesis**

### **a. Pengujian Hipotesis pertama: Penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 berpengaruh terhadap akuntabilitas lembaga amal zakat**

Hasil pengujian pengaruh Penerapan PSAK terhadap akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,021. Dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti pengujian hipotesis mampu menolak  $H_0$  Sehingga terdapat pengaruh positif penerapan PSAK No. 109 terhadap akuntabilitas lembaga amal zakat.

Hasil ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Ronnie (2010) dan Zein (2011) bahwasanya penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No.109 yang lebih besar oleh lembaga amal zakat menunjukkan peningkatan dalam akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Secara umum pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 memang dimaksudkan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat, Dengan demikian adanya peraturan tersebut maka laporan keuangan organisasi nirlaba seperti LAZ dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Adanya standar akuntansi baik pembuat maupun pembaca laporan keuangan memiliki acuan yang jelas mengenai akuntabilitas melalui sebuah laporan keuangan jika ini terjadi maka mudah bagi para muzakki untuk mengevaluasi laporan keuangan.

### **b. Pengujian Hipotesis kedua: Aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amal zakat**

. Hasil pengujian pengaruh aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,047. Dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti pengujian hipotesis mampu menolak  $H_0$  Sehingga terdapat pengaruh positif aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat.

Hasil ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyana (2006) dan Kadarmi (2007) bahwa aksesibilitas keuangan mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kemudahan untuk mengakses laporan keuangan lembaga amil zakat oleh publik akan memberikan peningkatan dalam akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Adanya pengaruh positif tersebut dikarenakan aksesibilitas yang diberikan oleh pengelola zakat bagi berbagai kalangan terhadap laporan keuangan yang dibuat akan mengurangi asimetri informasi yang ada. Hal ini didukung Halim. (2002) yang berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Dengan aksesibilitas yang baik maka publik dapat melihat dengan jelas struktur keuangan dari lembaga tersebut sehingga hal ini dapat menghindarkan dari pengelolaan yang tidak jelas terhadap dana zakat tersebut.

### **c. Pengujian Hipotesis ketiga: *Value for Money* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat.**

Hasil pengujian pengaruh *Value for Money* terhadap akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,020. Dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti pengujian hipotesis mampu menolak  $H_0$  Sehingga terdapat pengaruh positif *Value for Money* keuangan terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat.

Hasil ini didukung penelitian sebelumnya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penggunaan uang publik yang jelas memberikan peningkatan dalam akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Adanya pengaruh positif tersebut didukung Mardiasmo (2006) dimana pengujian kinerja berdasarkan *value for money* akan dipertimbangkan cukup baik untuk perusahaan nirlaba dimana sebagai sebuah kondisi kinerja organisasi yang diukur berdasarkan *value for money* akan memiliki pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik sehingga pengelola akan menggunakannya dengan benar dan akuntabel.

#### **4.3.2. Variabel Transparansi :**

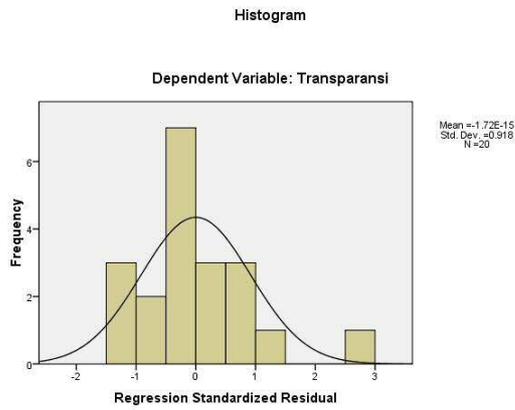
##### **4.3.2.1. Uji Asumsi Klasik**

Dalam pengujian yang menggunakan teknik analisis regresi berganda, maka data-data yang digunakan harus memenuhi beberapa uji asumsi, uji tersebut terdiri dari :

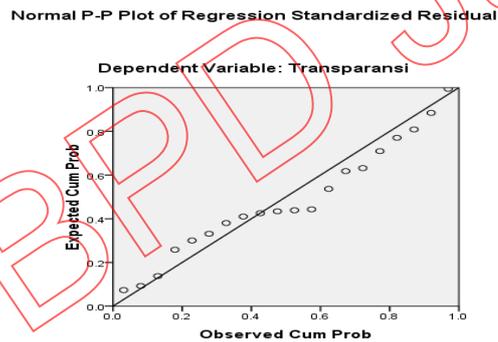
##### **1. Uji Normalitas**

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual model regresi. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada gambar pengujian berikut ini

Gambar 4.4  
Grafik Histogram



Gambar 4.5  
Grafik Uji Plot p-p



Tabel 4.13  
Uji normalitas residual  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.53442077
Most Extreme Differences	Absolute	.162
	Positive	.162
	Negative	-.090

Kolmogorov-Smirnov Z	.724
Asymp. Sig. (2-tailed)	.671
a. Test distribution is Normal.	

Hasil pengujian tersebut menunjukkan *residual* (kesalahan pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan nilai residual yang dekat dengan garis diagonal. Nilai Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan lebih besar dari 0,05.

## 2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Pengujian multikolinieritas dilakukan pada model regresi. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut.

Tabel 4.14  
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Nilai		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerapan PSAK	0.473	2.112	Bebas multikolinieritas
Akseibilitas	0.466	2.145	Bebas multikolinieritas
<i>Value for Money</i>	0.502	1.993	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

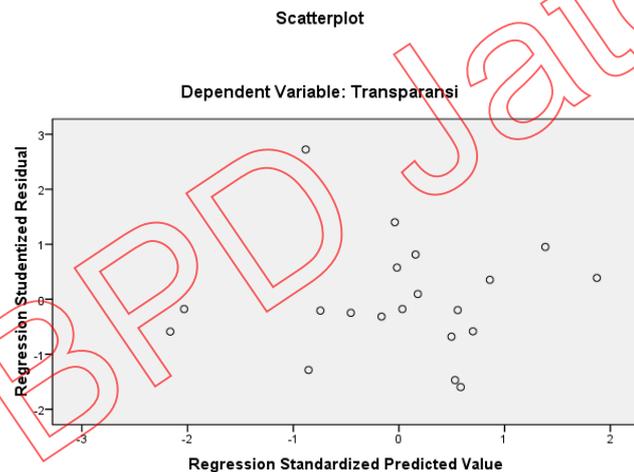
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregreskan seluruh variabel bebas terhadap nilai

mutlak residualnya. Jika tidak terdapat hasil yang signifikan, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

Gambar 4.6  
Grafik Scatter plot



Tabel 4.15  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.813	4.700		1.024	.321
Penerapan PSAK	-.164	.083	-.642	-1.988	.064
Aksebilitas	.106	.151	.228	.700	.494
Value for Money	.070	.058	.379	1.209	.244

a. Dependent Variable: AbsRes2

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara predictor dengan nilai residualnya. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas.

#### 4.3.2.2. Hasil Regresi

##### 1. Model Regresi

Hasil pengujian hipotesis 4 - 6 dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.16  
Model Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.300	7.913		.038	.970
Penerapan PSAK	.330	.139	.316	2.369	.031
Aksesibilitas	.569	.255	.300	2.232	.040
Value for Money	.334	.098	.443	3.423	.003

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Model persamaan diperoleh sebagai berikut :

$$Y_2 = 0,300 + 0,330 X_1 + 0,569 X_2 + 0,334 X_3 + e$$

Diperoleh bahwa semua variabel memiliki koefisien regresi dengan arah positif yang menunjukkan adanya potensi peningkatan transparansi yang berasal dari variasi penerapan PSAK No. 109, aksesibilitas dan *value for money*.

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar = 0,300. Artinya adalah apabila penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan, dan *Value for Money* dalam keadaan tetap atau konstan maka transparansi bernilai positif 0,300 atau transparansi naik sebesar 0,300 satuan.

2. Koefisien regresi penerapan PSAK No.109 ( $b_1$ ) = 0,330. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap Penerapan PSAK No. 109 akan mampu meningkatkan transparansi sebesar 0,330 satuan dengan asumsi aksesibilitas keuangan dan *Value for money* dalam keadaan tetap
3. Koefisien regresi aksesibilitas keuangan ( $b_2$ ) = 0,569 Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap aksesibilitas keuangan akan mampu meningkatkan transparansi sebesar 0,569 satuan dengan asumsi penerapan PSAK No. 109, *Value for Money* dalam keadaan tetap.
4. Koefisien regresi *Value for Money* ( $b_3$ ) = 0,334. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap *Value for Money* akan mampu meningkatkan transparansi sebesar 0,334 dengan asumsi PSAK No. 109 dan aksesibilitas keuangan dalam keadaan tetap.

#### 4.3.2.3 Uji Kebaikan Model

##### 1. Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh dari variabel penerapan PSAK 109, aksesibilitas dan *value for money* terhadap Akuntabilitas ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.17  
Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.930 <sup>a</sup>	.865	.840	1.672

a. Predictors: (Constant), Value for Money, Penerapan PSAK, Aksesibilitas

b. Dependent Variable: Transparansi

Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dari model regresi diperoleh sebesar 0,840, yang berarti bahwa 84,0% transparansi dapat dijelaskan oleh variabel penerapan PSAK, aksesibilitas dan *value for money*, sedangkan sisanya 16,0% transparansi dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

## 2. Uji Model Keseluruhan (Uji F)

Untuk menguji keberartian model secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil pengujian model secara keseluruhan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.18  
Uji Model  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	287.816	3	95.939	34.314	.000 <sup>a</sup>
	Residual	44.734	16	2.796		
	Total	332.550	19			

a. Predictors: (Constant), Value for Money, Penerapan PSAK, Akseibilitas

b. Dependent Variable: Transparansi

Hasil pengujian model secara keseluruhan menunjukkan nilai F sebesar 34,314 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, model pengujian dengan menggunakan variabel penerapan PSAK, aksesibilitas dan *value for money* sebagai model yang baik sehingga bisa dilakukan pengujian selanjutnya.

### 4.3.2.4. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Statistik-t

Uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara Penerapan PSAK No. 109, aksesibilitas keuangan, dan *Value for Money* terhadap transparansi secara parsial, pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.16 yang menunjukkan bahwa.

#### 2. Pengujian Hipotesis

##### a. Pengujian Hipotesis keempat: Penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat

Hasil pengujian pengaruh penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 terhadap transparansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,031. Dan

nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti pengujian hipotesis mampu menolak  $H_0$  Sehingga terdapat pengaruh positif penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 terhadap transparansi lembaga amil zakat.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa penerapan PSAK No. 109 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat transparansi dengan arah koefisien positif. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Ronnie (2010) dan Zein (2011) bahwasanya penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga.. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No.109 yang lebih besar oleh lembaga amil zakat menunjukkan peningkatan dalam transparansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Secara umum pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 memang dimaksudkan untuk mengatur pelaporan keuangan. Ketentuan SAK mengenai penyusunan item-item yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba memberikan satu kondisi yang dapat dilihat oleh publik bahwa pengelolaan zakat sudah sesuai dengan peruntukannya.

#### **b. Pengujian Hipotesis kelima: Aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat**

Hasil pengujian pengaruh aksesibilitas keuangan terhadap transparansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,040. Dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti pengujian hipotesis mampu menolak  $H_0$  Sehingga terdapat pengaruh positif aksesibilitas keuangan terhadap transparansi lembaga amil zakat.

Hasil ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyana (2006) dan Kadarmi (2007) bahwa aksesibilitas keuangan mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi.. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kemudahan untuk mengakses laporan keuangan lembaga amil zakat oleh publik

akan memberikan peningkatan dalam transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Aksebilitas menunjukkan kemudahan publik untuk melihat laporan keuangan yang disusun oleh pengelola organisasi zakat. Kondisi dapat menjadi pertimbangan bahwa pengelola akan semakin besar dalam mengurangi asimetri informasi yang ada sehingga pengelola akan banyak mengungkapkan hal-hal yang harus dilaporkan dengan benar.

**c. Pengujian Hipotesis keenam: *Value for Money* berpengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat**

Hasil pengujian pengaruh *Value for Money* terhadap transparansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003. Dan nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti pengujian hipotesis mampu menolak  $H_0$  Sehingga terdapat pengaruh positif *Value for Money* terhadap transparansi lembaga amil zakat.

Hasil ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mardiasmo (2006) bahwasanya penting adanya pengelolaan organisasi nirlaba yang berbasis *Value for Money* sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penggunaan uang publik yang jelas memberikan peningkatan dalam transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Adanya asumsi penggunaan dana publik dalam bentuk *value for money* menjadikan pengelola harus mampu menggunakan dana tersebut secara efektif dan benar karena salah satu tujuan dari organisasi sektor publik adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat yang konteksnya dalam penelitian ini adalah para muzakki, dengan membuat sebuah pertanggungjawaban yang transparan.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat sehingga penerapan PSAK No.109 oleh lembaga amil zakat akan meningkatkan akuntabilitas lembaga amil zakat. Penerapan PSAK No. 109 di lembaga amil zakat akan menjadikan kualitas laporan keuangan meningkat, dan mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas lembaga tersebut.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat sehingga aksesibilitas yang lebih besar terhadap laporan keuangan lembaga amil zakat akan meningkatkan akuntabilitas lembaga amil zakat. Adanya akses yang mudah terhadap laporan keuangan akan meminimalkan kesenjangan informasi antara pengelola LAZ dengan masyarakat karena pada dasarnya akuntabilitas tak hanya mengisyaratkan adanya laporan pertanggung jawaban saja akan tetapi juga kemudahan dan ketersediaan akses informasi.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Value for Money* memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat sehingga penggunaan konsep *Value for money* dalam operasional lembaga amil zakat akan meningkatkan akuntabilitas lembaga amil zakat. Akuntabilitas harus juga mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan lembaga, penerapan *Value for money* akan memberikan rasa aman pada pengelola LAZ jika sewaktu- waktu terdapat pertanyaan terkait pengelolaan dana umat

dalam sebuah laporan pertanggung jawaban. Sehingga pengelolaan dana publik akan lebih jelas dan akuntabel

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 memiliki pengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat sehingga penerapan PSAK No. 109 oleh lembaga amil zakat akan meningkatkan transparansi lembaga amil zakat. Secara umum pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 memang dimaksudkan untuk mengatur pelaporan keuangan. Ketentuan SAK mengenai penyusunan item-item yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba memberikan satu kondisi yang dapat dilihat oleh publik bahwa pengelolaan zakat sudah sesuai dengan peruntukannya.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat sehingga Aksesibilitas yang lebih besar terhadap laporan keuangan lembaga amil zakat akan meningkatkan transparansi lembaga amil zakat. Aksesibilitas menunjukkan kemudahan publik untuk melihat laporan keuangan yang disusun oleh pengelola organisasi zakat. Kondisi dapat menjadi pertimbangan bahwa pengelola akan semakin besar dalam mengurangi asimetri informasi yang ada sehingga pengelola akan banyak mengungkapkan hal-hal yang harus dilaporkan dengan benar
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Value for Money* memiliki pengaruh positif terhadap transparansi lembaga amil zakat sehingga penggunaan konsep *Value for money* dalam operasional lembaga amil zakat akan meningkatkan transparansi lembaga amil zakat. Adanya asumsi penggunaan dana publik dalam bentuk *value for money* menjadikan pengelola harus mampu menggunakan dana tersebut secara efektif dan benar karena salah satu tujuan dari organisasi sektor publik adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat yang konteksnya dalam penelitian ini adalah para muzakki, dengan membuat sebuah pertanggungjawaban yang transparan.

## **5.2. Keterbatasan**

Hasil analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan yang sebaiknya menjadikan perhatian dan disarankan bagi penelitian selanjutnya yaitu instrumen pengukuran variabel penelitian ini semua diisi oleh subyek penelitian khususnya untuk transparansi dan akuntabilitasnya sehingga hal ini memungkinkan adanya subyektifitas yang tinggi dari responden.

## **5.3 Saran**

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan checklist atas laporan keuangan LAZ, untuk menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangannya diantaranya dapat dilakukan dengan luas pengungkapan yang diberikan dalam laporan keuangan LAZ.

## **5.4 Implikasi Manajerial**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana oleh lembaga amil zakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lembaga amil zakat. Pelaksanaan PSAK No.109 yang didukung dengan tingkat aksesibilitas keuangan yang baik serta pengelolaan yang berbasis *Value for Money* akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat, karena kualitas laporan akan lebih baik, dengan tingkat akses yang mudah dan pola pengelolaan yang efektif, ekonomis, dan efisien. tentunya jika lembaga amil zakat dinilai akuntabel dan transparan maka akan meningkatkan kepercayaan publik untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya ke lembaga amil zakat. Dengan demikian dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun oleh lembaga amil zakat dapat meningkat, Sehingga akan mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat, infaq, dan sedekah yang terjadi selama ini.